

info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI

INFO PASTI EDISI VII - TAHUN 2021

inspirator pengelolaan barang



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIKASI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENYADARAN KEMENTERIAN KEUANGAN



Melukis Indonesia dengan penghargaan tertinggi bagi pengelola barang milk negara yang profesional dan handal di seluruh pnejuru negeri melalui BMN Awards Tahun 2021 demi terwujudnya pengelolaan BMN yang efektif, efisein dan akuntabel.

Ilustrasi sampul oleh
Indyashadi Satya

DITERBITKAN OLEH

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan
Pengadaan, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Keuangan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Manajemen
Barang Milik Negara dan Pengadaan
Edy Gunawan

PEMIMPIN REDAKSI

Kabag Otomasi Proses Bisnis dan
Manajemen Informasi
Luqman Joyo Kartono

REDAKTUR PELAKSANA

Plh. Kasubbag Publikasi dan Kerjasama
Yudha Pratama

TIM REDAKSI

Timbul Tambun, Jeri Martin, Ayu Damelia,
Fuzy Wahyudi, Indyashadi Satya, Beby Vizca

REDAKTUR FOTO

Jeri Martin, Fuzy Wahyudi

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Jeri Martin

ALAMAT REDAKSI

Gedung Djuanda 2 Lantai 17,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

KONTAK

 [pastikanasetkita](#)  [info_pasti](#)

www.romadan.kemenkeu.go.id

call center: 143

Luqman Joyo Kartono

Pemimpin Redaksi

“Inspirator Pengelolaan Barang Milik Negara”

Mindset pengelolaan telah berubah. Semula hanya sekedar administrator BMN berubah manajer BMN. Sebagai manajer punya peran agar aset BMN yang dimiliki bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kantor atau negara. Sebagai manajer juga berperan a untuk merencanakan sebaik mungkin agar dapat digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk perlu untuk dihapuskan jika sudah dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi. Dan tidak lupa peran administrasi untuk memperbaiki data pada master aset dan pelaporan BMN tetap dijalankan oleh manajer aset.

Untuk mengidentifikasi dan mengapresiasi manajer-manajer handal dan profesional di bidang pengelolaan BMN, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memberikan BMN Award lingkup Kementerian Keuangan. BMN Award meliputi kategori Perencanaan, Utilisasi dan Optimalisasi, Pengamanan, Penghapusan, Kualitas Data Master Aset, dan Pelaporan BMN. Apresiasi seperti ini sangat penting agar satuan kerja mempunyai kebanggaan atas keberhasilan dalam pengelolaan BMN serta mendorong satuan kerja lainnya untuk berkompetisi dalam perbaikan kualitas pengelolaan BMN.

Peran penting pengelolaan BMN semakin penting dengan adanya perubahan pola kerja baru (New Way of Working). Melalui budaya kerja, setiap pegawai dapat bekerja di mana saja sehingga kebutuhan ruang kerja. Maka penataan ruang kerja perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta memanfaatkan space yang belum termanfaatkan, untuk dioptimalkan dapat digunakan unit lain yang membutuhkan atau disewakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara, perlu ada penyesuaian terhadap pemanfaatan terhadap BMN yang ada di Jakarta sehingga BMN dapat dioptimalkan secara maksimal.

Pada edisi ini, Tim Info Pasti menggali lebih dalam kisah sukses para penerima penghargaan BMN Award agar dapat diambil pelajaran oleh unit lain dalam mengelola BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kiat-kiat baik sisi perencanaan, pemanfaatan sampai dengan penghapusan dan pengelolaan BMN lainnya, secara garis besar dapat digali dari para penerima penghargaan. Detail dari langkah-langkah yang diambil para pengelola BMN, dapat dikomunikasikan langsung para penerima penghargaan terkait.

Pembahasan terkait dengan pengadaan barang/jasa juga tidak akan habis untuk selalu menjadi bahan diskusi. Tulisan dari pejabat fungsional pengadaan, akan membarikan gambaran yang lebih luas terkait pengadaan barang/jasa. Pembahasan tentang model baru pengadaan melalui platform bela (belanja langsung) pengadaan dan dampak pengadaan barang/jasa di masa pandemi menjadi isu yang diangkat. Majalah info pasti selalu mengangkat tema-tema aktual di bidang pengadaan barang/jasa untuk bahan diskusi di ruang publik dan menjadi input dalam perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa.

BMN AWARD 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, diselenggarakan penilaian kinerja pengelolaan BMN secara berkala dengan memberikan penghargaan kepada para Kuasa Pengguna Barang (KPB) dalam bentuk BMN Award.

KATEGORI

- *Kualitas Perencanaan BMN*
- *Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN*
- *Kualitas Pengamanan BMN*
- *Kualitas Penghapusan BMN*
- *Kualitas Data Master Aset;*
- *Kualitas Laporan BMN*

Teks: Esa

Infografis: Esa

TUJUAN

2
meningkatkan pemahaman dan awareness para KPB terkait tanggung jawab pengelolaan BMN

1
memberikan penghargaan bagi para kepala satuan kerja (satker) selaku KPB yang tertib terhadap pengelolaan BMN;

3
mendorong kolaborasi KPB, Pengguna Barang dan Pengelola Barang terkait pengelolaan BMN

KLASTERISASI

Satker Kecil: satker yang memiliki jumlah BMN sampai dengan 500 (lima ratus) NUP

Satker Kecil: satker yang memiliki jumlah BMN sampai dengan 500 (lima ratus) NUP

Satker Kecil: satker yang memiliki jumlah BMN sampai dengan 500 (lima ratus) NUP

PEMENANG



JUARA UMUM

Hadiyanto

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Setiap kategori ditetapkan 1 (satu) pemenang dari masing-masing klasterisasi.

Juara Umum adalah eselon I dengan jumlah KPB terbanyak sebagai Pemenang dari semua kategori



KUALITAS PERFORMANSI

ki-ka :

Iyan Rubiyanto, Sekretaris DJPPR (satker besar)
Hario Damar, Kepala Pusdiklat Pajak (satker menengah)
Mas Yogi, Kepala GKN Balikpapan (satker kecil)



KUALITAS PENGAMANAN

ki-ka :

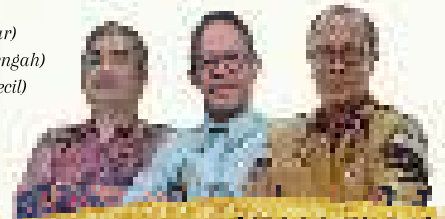
Robi Toni, Sekretaris Kantor Pusat DJBC (satker besar)
Moch, Fajar Adcha, Plt 2 Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat (satker menengah)
Mahdi, Kepala KPKNL Mamuju (satker kecil)



KUALITAS EFISIENSI DAN OPTIMALISASI

ki-ka :

Sutopo Ari, Plt Kepala KPPBC TMC Kudus (satker besar)
Syahrul Eilly, Kepala KPTIK BMN Medan (satker menengah)
Aloysius Yanis, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta (satker kecil)



KUALITAS PENGHAPUSAN

ki-ka:

Anggrah Warsono, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II (satker besar)
Bustami, Kepala KPPN Singkawang (satker menengah)
Khairil Indra, Kepala KPPN Pekanbaru (satker kecil)



KUALITAS DATA MASTER ASSET

ki-ka:

Robi Toni, Sekretaris Kantor Pusat DJBC (satker besar)
Hartana, Kepala KPPN Surakarta (satker menengah)
Jordan, Kepala KPPN Singaraja (satker kecil)



KUALITAS LAPORAN

ki-ka:

Heru Pudyo, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat (satker besar)
Nengah Santi, Kepala KPPN Larantuka (satker menengah)
Irjan Huzairi, Kepala KPPN Medan II (satker kecil)

Teks: Indyashadi Satya

Design: Esa

Kerja Tulus Yang Berbuah Manis

Dalam rangka optimalisasi barang milik negara (BMN), Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan BMN Award untuk memberikan apresiasi kepada para pengelola BMN. Penghargaan BMN Award ini terdapat 6 kategori pemenang, beberapa diantaranya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dan KPKNL Mamuju meraih juara kategori Kualitas Pengamanan BMN satker menengah dan satker kecil. Pengumuman pemenang BMN Award ini dilaksanakan pada acara Family Gathering Hari Oeang ke-75 Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2021.

Pada moment ini tim dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada plt kepala kantor Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Fajar Adcha yang akrab disapa Fajar dan Kepala KPKNL Mamuju, Mahdi. Keduanya tidak menyangka bahwa satker mereka meraih penghargaan kategori kualitas pengamanan BMN karena acara BMN Award ini tidak melalui pendaftaran dari satker namun sistem penilaian BMN Award ini otomatis menilai seluruh satker Kementerian Keuangan, Sehingga hasil kerja tulus mereka selama ini merasa diapresiasi.



“Tidak sedikit pun terbersit KPKNL Mamuju akan memperoleh BMN Award. Kami tidak beranggapan apa yang telah kami lakukan lebih baik dari satker lain karena apa yg kami laksanakan hanya berusaha memenuhi ketentuan terkait pengelolaan BMN. Kami melakukan Pengelolaan BMN sesuai peraturan sebagaimana siklus pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dimana setiap tahap dilakukan secara tertib”, ucap Mahdi. Fajar selaku Plt Kepala Kanwil Sulawesi Barat ini juga bercerita pengalaman menarik saat terjadi gempa di Kabupaten Mamuju pertengahan tahun 2021 lalu bagaimana kantor tempatnya bertugas waktu itu di Gedung Keuangan Negara nyaris hancur karena gempa. Proses evakuasi BMN

seperti dokumen-dokumen penting, perangkat pengolah data yang mudah dievakuasi dan sangat dibutuhkan dalam pemberian layanan. Dikarenakan banyaknya BMN yang harus dievakuasi dan masih tingginya intensitas gempa susulan, proses evakuasi dilakukan secara bertahap oleh Tim Evakuasi yang terdiri dari pegawai yang berani dan memahami kondisi gedung sudah tidak stabil. Dirinya dan Mahdi selaku Kepala Kantor KPKNL juga ikut andil dalam proses evakuasi tersebut walau resiko tertimpa reruntuhan menjadi taruhannya. Tidak sampai di situ, proses evakuasi BMN yang saat itu dalam kondisi pandemi Covid-19 gelombang dua membuat sebagian pegawai yang bertugas terinfeksi virus Covid dan harus menjalani isolasi mandiri bersama ditempat yang kurang memadai. “Saat itu kami mempertaruhkan nyawa kami dari bangunan yang

hampir runtuh untuk menyelamatkan BMN yang masih bisa diselamatkan walaupun sebagian pegawai harus isolasi mandiri karena terinfeksi virus. Namun kami bekerja tulus bersama-sama”, ujar Fajar. Pasca gempa yang menimpa gedung kantor GKN Mamuju, masing-masing unit menempati kantor sementara di ruko dan terpisah-pisah. Tak hanya gedung kantor, namun beberapa rumah dinas pun juga rusak akibat gempa tersebut. Hal yang dilakukan oleh Fajar dan Mahdi adalah memanfaatkan aset yang ada pasca gempa, dengan cara mengambil, menjaga, mencatat BMN-BMN yang berada pada gedung lama agar BMN tidak terpisah-pisah dan dapat digunakan untuk pelaksanaan tusi. BMN yang berhasil dievakuasi kemudian dilakukan inventarisasi dan update kondisi untuk mencocokkan kondisi fisik barang dengan data BMN pada aplikasi Sakti. Tim evakuasi juga memilah antara BMN kondisi rusak berat dengan yang masih dalam kondisi baik. Selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di Rumah Negara sebagai bentuk pengamanan yang selanjutnya dilakukan pengusulan penghapusan untuk BMN dengan kondisi rusak berat. Serta secara rutin menghimbau untuk memenuhi persyaratan dalam penghunian rumah dinas, yaitu seperti surat penghunian (SIP) rumah dinas dan

syarat-syarat yang menunjang (pasfoto penghuni, fotokopi KTP, SK jabatan, surat keterangan sudah tidak menempati rumah dinas dari kantor sebelumnya. Selanjutnya dalam hal awareness Kanwil Provinsi Sulawesi Barat juga membuat inovasi dengan memberikan labeling berupa stiker berwarna yang menandakan keberadaan barang tersebut, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi BMN sesuai bidang masing-masing terutama pascagempa sehingga dapat tertata lebih rapi. “Penghargaan ini bukan untuk saya, melainkan mereka-mereka (pegawai) lah yang bekerja. Penghargaan ini milik mereka”, ucap Mahdi diakhir wawancara.



Teks: Ayu Damelia

Foto: Syarif

Perjuangan Mengelola Aset Negara di Barat Indonesia

KPTIK BMN – MEDAN

Tim Info Pasti – Biromadan juga mengunjungi kota yang pernah dijuluki “Parijs van Sumatra”, untuk bertemu dengan para pengelola aset negara di Medan, Sumatera Utara.

Tidak hanya terdapat Danau Toba yang membentang luas di tanah ini, para insan pengelola aset negara juga berdiri tegar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas.

Tak heran, 3 satuan kerja dari daerah Sumatera Utara mendapatkan penghargaan pada BMN Awards Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pagi itu (2/11) tim Warta Info Pasti disambut hangat oleh Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) Medan, Syahrul Elly Mahyudin. Beliau meyampailan “Jika kami dianggap layak untuk menerima BMN Award ini, kami dengan senang hati akan menerimanya dan akan menjadikan *award* ini sebagai semangat bagi kami untuk melaksanakan yang terbaik pada hari-hari mendatang.”

Syahrul dan para pengelola aset di KPTIK BMN Medan pun tidak menyangka dan berekspektasi ting-



gi ketika diberitahu menjadi juara dalam BMN Award Tahun 2021 dalam Kategori Kualitas Utilisasi & Optimalisasi BMN, Satker Menengah.

“Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas pengelolaan BMN dengan sebaik-baiknya. Terutama dengan adanya RP4 yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan, kami mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik.” Ujar Syahrul dengan penuh antusias.

KPTIK BMN Medan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan BMN, tidak hanya untuk menghasilkan PNBPN, namun dengan melaksanakan penggunaan sementara sebagai inovasi pemanfaatan BMN untuk digunakan pihak lain, sehingga pengeluaran

negara pada pihak lain tersebut dapat diefisienkan (*cost saving*).

Optimalisasi BMN yang menghasilkan efisiensi pengeluaran negara:

- Penggunaan sementara BMN berupa Tanah dan Bangunan oleh Kanwil I KPPU;
- Penggunaan sementara BMN berupa sebagian Tanah dan Bangunan oleh LPSK.

Optimalisasi BMN yang menghasilkan PNBPN:

- Sewa BMN berupa Tanah dan Bangunan untuk kantor kas BRI;
- Sewa BMN berupa Tanah untuk ATM BNI;
- Sewa BMN berupa Tanah untuk fotocopy dan katin;
- Sewa BMN berupa Tanah dan Bangunan berupa Aula di GKN Medan untuk sewa per jam;



- Sewa BMN berupa Tanah dan Bangunan berupa Lapangan dan Lobby di GKN Medan untuk sewa per jam atau per hari.

Syahrul juga menjelaskan kepada Tim Warta Info Pasti, RKBMN seharusnya disusun dengan pertimbangan kebutuhan yang rinci, sehingga tidak ada perencanaan yang berlebihan atau gagal dilaksanakan. Jika masih memungkinkan, maka sebaiknya dilakukan optimalisasi BMN yang sudah ada. Selama pemeliharaan BMN dilakukan dengan baik, maka rencana pengadaan dan pemeliharaan dapat lebih efektif dan efisien.

Upaya - upaya mengoptimalkan aset terus dilakukan oleh KPTIK BMN Medan, salah satunya adaah rencana memanfaatkan area / ruangan yang belum dioptimalkan penggunaannya di

GKN Medan. Mendukung konsep Ruang Kerja Masa Depan dan *Activity Based Workplace*, Syahrul menyampaikan bahwa "Area yang belum optimal tersebut saat ini kami rencanakan untuk dijadikan lokasi ruang kerja bersama dan fasilitas tambahan lainnya di GKN Medan tahun depan. Optimalisasi ini mungkin tidak menghasilkan PNBP secara khusus, namun akan memberikan fasilitas ruang kerja bersama bagi seluruh satker dan pengguna GKN Medan dalam rangka implementasi rencana Ruang Kerja Masa Depan di Kementerian Keuangan."

Penyerahan Plakat dan Piagam menjadi hidangan penutup dari rangkaian diksusi kami dengan rekan-rekan KPTIK BMN Medan, sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada KPTIK BMN atas kinerja yang maksimal dalam pengelolaan barang milik negara.

KPPN MEDAN II

Masih berlokasi di GKN Medan, tim Info Pasti pun mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendahaaaran Negara (KPPN) Medan II yang mendapatkan juara dalam BMN Awards Tahun 2021 Kategori Kategori Kualitas Laporan BMN, Satker Kecil.

Irfan Hizairin, Kepala KPPN Medan II menyambut dengan penuh rasa Bahagia kedatangan kami. Menurut Irfan, kegiatan BMN Award ini dapat menjadi momen dalam melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milk Negara. Sebagai pemenang dalam kategori kualitas laporan BMN, Irfan menuturkan bahwa laporan keuangan dalam hal ini neraca mengandung komponen aset yang merupakan barang milik



negara. Demikian juga belanja barang dan modal juga sebagian akan menjadi BMN. Sehingga jika pengelolaan BMN bermasalah akan berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan pada gilirannya kualitas LKPP menjadi berkurang. KPPN Medan II juga terus berupaya meningkatkan penataan BMN secara fisik maupun administrasi dengan melakukan inventarisasi aset secara berkala, dengan mencocokkan data antara laporan dan kondisi fisik BMN di setiap ruangan, memastikan semua transaksi keluar dan masuk BMN sudah terekam di aplikasi SAKTI dengan menggunakan aplikasi monsakti dan e-rekonsiliasi untuk memonitoring BMN tersebut dan memastikan BMN milik KPPN Medan II telah ditetapkan status penggunaannya, dan dapat di monitor pada aplikasi SIMAN dan aplikasi SAKTI. “Mengelola BMN ini gampang-gampang susah, karena kita harus faham jenis BMN dan letak BMN yang menjadi objek laporan kita, dan kita

juga harus memastikan semua BMN dalam kondisi baik untuk dapat digunakan mendukung pelaksanaan tupoksi kantor.” ujar Irfan.

KPPN Medan II yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Medan yang secara Pelaporan GKN Medan merupakan aset satker KPTIK BMN Medan. BMN yang dikelola oleh KPPN Medan II hanya berupa Peralatan dan Mesin, sehingga dengan demikian sampai saat ini belum dapat dilakukan optimalisasi BMN. Adapun BMN berupa Peralatan dan Mesin tersebut telah dimaksimalkan penggunaan untuk mendukung kinerja KPPN Medan II dalam hal memberikan pelayanan kepada stakeholder. Irfan juga menyampaikan kepada Tim Info Pasti “Sinergi antar satker didalam gedung GKN Medan sangat baik dan tidak terdapat silo-silo antar instansi atas yang menjadi rekan kami dalam berkoordinasi untuk menghasilkan yang terbaik. Untuk terus mengop-

timalkan bmn kami selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait agar memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dan semua berjalan dengan lancar dan tepat waktu.”

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Pagi itu (3/11) Tim Info Pasti disambut dengan suasana kota Medan yang berlangit biru, matahari bersinar sangat terang siap menemani kami menuju kota Pematang Siantar yang akan ditempuh selama kurang lebih 3 jam. Setibanya kami di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II, kami bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Anggrah Warsono bersama dengan tim pengelola BMN disana.

Menurut Aggrah, ada atau tidak adanya kegiatan BMN Award seluruh tahapan pengelolaan BMN wajib dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan

tugas dan fungsi. Beliau juga menanamkan kepada seluruh pegawai bahwa BMN adalah Barang Milik Negara, yang penggunaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab kita pemegang BMN, sehingga penggunaannya dan pemeliharannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kanwil DJP Sumatera Utara II mendapatkan juara dalam BMN Awards Tahun 2021 Kategori Kategori Penghapusan BMN, Satker Besar. Anggrah menjelaskan bahwa pelaksanaan penghapusan BMN sangat penting sekali, agar siklus pengelolaan BMN dapat berjalan dengan baik. Dimana dalam siklus ini seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan dapat terlaksana dengan baik dan siklus dapat berjalan sesuai fungsi masing-masing.

Anggrah juga menuturkan bahwa Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) sangat penting demi terwujudnya BMN yang efektif dan efisien.

Optimalisasi BMN yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera utara II adalah :

- Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa kantin. Setiap tahun dilakukan perpanjangan sewa kantin dengan nilai sewa naik setiap tahunnya.
- Lahan halaman gedung kantor di rencanakan di sewa oleh PT. Bank Mandiri untuk drive thru ATM. Masih terkendala dalam hal luas tanah yang digunakan

Penggunaan BMN

- Tanah kosong yang berlokasi di Jalan Kain Sungkit dan Adam Malik diusulkan pengadaan RN di TA 2024

Pemeliharaan BMN

- Bongkaran Rumah Negara yang membahayakan lingkungan sekitar juga telah kami lakukan demi tercapainya manfaat sosial dan PNBP ke Kas Umum Negara.

“Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) sudah sangat baik dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan BMN yang tepat dan akurat, mulai dari master aset, perencanaan, wasdal, pemutakhiran data, pengelolaan, penelusuran aset, inventarisasi 5-Tahunan, dan Revaluasi BMN” ujar Anggrah.

Tim Info Pasti mengajak Kepala DJP Sumatera utara II untuk berbagi strategi dalam pengelolaan BMN dikantornya, beliau mengatakan bahwa dalam Perencanaan BMN harus memperhatikan rincian kebutuhan BMN yaitu pengadaan barang yang telah dilaksanakan dan keadaan yang sedang berjalan yang dipakai sebagai dasar dalam rencana pengadaan akan dilaksanakan. Perencanaan kebutuhan BMN harus berpedoman pada SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan) untuk bisa melakukan perencanaan BMN dengan tepat waktu, efektif dan efisien, maka kita harus menghitung terlebih dahulu SBSK dengan data BMN eksisting dikurangi data BMN dalam kondisi Rusak Berat yang harus segera dipindahtangankan dan dihapuskan.

Pada akhir diskusi dengan penuh kebahagiaan dan antusias Anggrah mengapresiasi pelaksanaan BMN Award, karena hal ini mendorong seluruh Satker

untuk melaksanakan tahapan pengelolaan BMN dengan efektif dan optimal.

Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk para pengelola aset negara dari ujung Barat Indonesia. BMN AWARDS Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dorongan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan.



Teks: Jeri Martin

Foto: Beby Vizca

Fokus Sisir BMN Sampai Tuntas



KPPN Pekanbaru memang layak sebagai juara karena selama ini telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik” ucap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru, Khairil Indra yang mendapatkan penghargaan BMN Awards pada kategori Kualitas Penghapusan BMN Klasterisasi Satker Kecil yang diselenggarakan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan tahun 2021. Namun, tentu saja ucapan tersebut adalah hasil upaya kerja keras dari KPPN Pekanbaru dalam mengelola dan menyisir BMN yang ada. Semua BMN pada KPPN Pekanbaru dengan julukan Kota Bertuah dan Kota Madani tersebut telah dicatat, ditata dan dipilah kondisi juga peruntukannya secara baik juga tuntas.

Dalam wawancara Tim Biromadan, Khairil Indra menuturkan bahwa adanya BMN Awards ini tidak terpikirkan sama sekali bahwa satker-nya akan menjadi juara. Namun upaya memastikan semua BMN yang ada sudah memenuhi standardisasi yang ditetapkan dan benar-benar bisa digunakan/ dimanfaatkan oleh seluruh pegawai sudah dilakukan sejak Khairil Indra 2 (dua) hari menjabat sebagai Kepala KPPN Pekanbaru, yaitu jauh sebelum adanya pelaksanaan BMN Awards. Kepala KPPN Pekanbaru menginstruksikan kepada Kepala Subbagian Umum untuk menginventarisir seluruh BMN yang ada dan mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kelompok :

1. Barang yang wujudnya ada dan ada dalam catatan BMN;
2. Barang yang wujudnya ada dan tidak ada dalam catatan BMN;

3. Barang yang wujudnya tidak ada dan ada dalam catatan BMN.

Setelah dikelompokkan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penghapusan untuk memastikan bahwa semua BMN pada KPPN Pekanbaru hanya barang-barang yang benar-benar siap digunakan dan memenuhi standar yang dibutuhkan. Pelaksanaan penghapusan BMN yang tepat waktu dan terdokumentasi dengan lengkap oleh KPPN Pekanbaru terjadi dikarenakan pelaksanaan penghapusan BMN dilakukan sesuai dengan time frame yang sudah ditetapkan. Namun, terlepas dari jadwal yang telah ditentukan KPPN Pekanbaru juga dengan sendirinya sudah melakukan langkah-langkah cepat dalam melaksanakan penghapusan tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang ada.

Setiap tahapan dalam proses pelaksanaan penghapusan BMN didokumentasikan dengan baik dan dibuat dalam bentuk buku yang berjumlah 4 (empat) buah. Dengan pengadministrasian yang baik akan meminimalisir terjadinya dokumen yang terlewat. Khairil Indra juga menuturkan “Tidak ada strategi khusus dalam perencanaan BMN, namun yang perlu dilakukan hanya tertib sesuai ketentuan yang ada dimulai dengan menginventarisir BMN yang dimiliki dan dilanjutkan dengan proses perencanaan melalui RKBMN dan memastikan semua proses tersebut baik dari waktu dan kelengkapan dokumen.



Proses tersebut juga selalu diingatkan dan dilaporkan dalam kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)”. Pernyataan tersebut bisa menjadi perhatian kepada satker lainnya bahwa dalam mengelola BMN yang perlu dilakukan ialah minimal dimulai dengan tertib administrasi. Wawancara ditutup dengan pesan dari Kepala KPPN Pekanbaru kepada BiroMadan bahwa BMN Awards harus tetap dilanjutkan untuk memotivasi satker di Lingkungan kementerian Keuangan agar pengelolaan BMN lebih baik.



“Kami sangat mengapresiasi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan atas langkah-langkah dan perubahan yang sudah dilakukan baik dari sisi layanan dan koordinasi yang sangat berharga bagi kami selama dilaksanakan BMN Award ini” tutup Khairil Indra sembari memberikan plakat ucapan terima kasih atas layanan BiroMadan yang cepat, efisien, akuntabel, optimal dan PASTI.

Teks: Beby Vizca

Foto: Fuzy Wahyudi

Pengelolaan Master Aset Yang Rapi Dari Kota Berseri

“Berseri, bersih sehat rapi indah,
pancen nyata prakanca, kutha Solo”.

Itulah penggalan lagu yang terngiang di kepala penulis ketika menjejakkan kaki di Kota Solo.

Lagu tersebut merupakan lagu yang memuat slogan Kota Solo yaitu Berseri, bersih, sehat, rapi dan indah. Rasanya slogan tersebut terasa sangat melekat di benak setiap wong solo, tercermin dari perilaku warganya yang bersih sehat rapi dan indah. Hal tersebut tidak hanya tercermin pada keadaan kotanya, namun juga tercermin pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh satuan kerja yang ada di kota ini.

Pada Tahun 2021, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan BMN Award untuk memberikan apresiasi kepada para pengelola BMN. Penghargaan BMN Award ini terdapat 6 kategori yang dinilai oleh tim penilai BMN Award, masing-masing kategori terdapat 3 klasterisasi satker yaitu satker besar, menengah, dan kecil. Salah satu satker yang mendapatkan penghargaan BMN Award tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta yang mendapatkan penghargaan pada kategori Kualitas Data Master Aset satker menengah. Para pemenang BMN Award ini diumumkan



pada acara puncak Family Gathering Hari Oeang ke-75 Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2021. Berkaitan dengan acara tersebut, Tim Biromadan berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada kepala kantor KPPN Surakarta yaitu Hartana. Hartana menuturkan bahwa dia beserta jajaran pegawai KPPN Surakarta berterima kasih karena seluruh upaya satkernya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan mendapatkan apresiasi. Menurutnya BMN Award ini merupakan terobosan agar satker di lingkup Kemenkeu termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN-nya dan merupakan reward dari Pimpinan Kemenkeu untuk satker pengelola BMN dengan kualitas terbaik.

Penghargaan BMN Award kategori Kualitas Data Master Aset tidak datang begitu saja, namun merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh KPPN Surakarta dalam mengelola BMN khususnya kelengkapan serta validitas data Master Aset. Karena menurut Hartana, kelengkapan Data Master Aset di aplikasi SIMAN menjadi salah satu fokus dari Biromadan maupun Kantor Pusat DJPb beberapa tahun terakhir ini. Sehingga pihaknya sangat menanamkan awareness pegawai untuk melengkapi data master aset dan melakukan update apabila ada perubahan data. Disamping itu, Tim Setditjen Perbendaharaan secara rutin melakukan monitoring pengisian data master aset pada satker di DJPb. Namun tentunya bukan berarti tidak ada kendala dalam melakukan upaya-upaya tersebut. “Dalam upaya melengkapi Data Master Aset di aplikasi SIMAN, tantangan yang



kami hadapi antara lain adalah banyaknya jumlah aset pada KPPN Surakarta. Jumlah aset di KPPN Surakarta saat ini kurang lebih 1.479 NUP. Khusus Tanah dan Bangunan sebanyak 31 NUP yang terdiri dari Tanah Kantor 1, Tanah Rumah Negara 12, Gedung Kantor 1, dan Rumah Negara 17", tuturnya. Hartana juga menuturkan pengalaman menarik dalam melengkapi data Master Aset Rumah Negara yang pada awalnya terkendala beberapa isian terkait pengisian struktur bangunan dan lain-lain, karena tidak memiliki data dimaksud. Namun, kendala tersebut dapat teratasi pada saat pihaknya mengusulkan pembuatan gambar ledger rumah negara pada KPPN Surakarta oleh Tim Dinas PU Provinsi Jawa Tengah yang turun langsung ke lapangan. Dari gambar ledger itulah data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi data master aset tersedia.

Sebagai success story, Hartana juga memberikan kiat-kiat untuk dapat menjaga kelengkapan data Master Aset yang handal dan akuntabel. "Jangan tunda melakukan input dan update. Artinya, apabila ada data baru yang perlu diinput atau ada perubahan (update) data di aplikasi SIMAN agar segera dieksekusi. Kalau hal ini secara rutin dilakukan, Saya percaya data master aset tiap satker akan lengkap dan aktual", tambah Hartana. "Kami sangat antusias dan menyambut baik dengan diadakannya BMN Award Tahun 2021. Dengan adanya BMN Award ini, kami menjadi semakin termotivasi untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Semoga, BMN Award ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan kualitas pengelolaan BMN kita semakin baik", pungkas Hartana sebagai penutup wawancara.

Teks: Indyashadi Satya

Foto: Fuzy Wahyudi

Mengenal Pengelola Aset di Kota Malin Kundang

“Duduak Sahamparan, Makan Saedangan” yang artinya duduk sehamparan makan sehidangan, salah satu kata bijak dari Bahasa Minang yang menggambarkan kuatnya kebersamaan suku yang menduduki kota Padang ini.

Kota Padang adalah ibukota dari provinsi Sumatera Barat. Kota yang terkenal dengan legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya ini berbatasan langsung dengan laut dan perbukitan, sehingga secara otomatis mempunyai beragam tempat wisata menarik.

Tim Info Pasti kali ini berkesempatan untuk mendengarkan cerita pengelolaan Aset dari kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Prov. SumBar) yang dinahkodai oleh Kepala Kantor, Heru P. Nugroho, pada tahun ini mendapatkan penghargaan pada BMN Awards Tahun 2021 dalam Kategori Kualitas Laporan BMN, Satker Besar.

“Ekspetasi saya ketika mendengar bahwa akan dilaksanakan kegiatan BMN Award, saya sangat mengapresiasi dan antusias atas inisiatif Biro Ramadan untuk menyelenggarakan kegiatan apresiatif tersebut. Apalagi kegiatan



ini merupakan inisiatif yang baru pertama kali dilakukan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Inisiatif BMN Award mendorong saya dan jajaran pengelola BMN di Kanwil DJPb Sumbar untuk berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan tersebut.” Ujar Heru yang sangat bahagia saat itu sambil menggenggam plakat penghargaan.

Menurut Heru, BMN Award telah mendorong Kanwil DJPb Prov. SumBar sebagai kuasa pengguna barang untuk bekerja keras meningkatkan kualitas tata kelola BMN dan terus optimis karena proses yang optimal tidak akan mengkhianati hasil.

Sebagai juara dalam Kategori Kualitas Laporan BMN, Heru menuturkan pengelolaan BMN secara tertib dan berkualitas sangat penting untuk mendukung Laporan BMN yang akurat dan

akuntabel dalam mendukung kewajaran nilai asset di Neraca Keuangan. Kewajaran nilai asset pada neraca laporan keuangan sangat krusial dalam mendukung perolehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dalam kesehariannya selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala kantor wilayah, Heru turut memberikan pengarahan, bimbingan dan semangat kepada pegawai agar semakin bertanggung jawab dan ikut memelihara BMN sebagai bagian kegiatan pengelolaan BMN. Demikian pula pegawai yang terlibat dalam pengelolaan BMN kami dorong untuk dapat bekerja mengelola BMN secara lebih baik, akurat dan akuntabel.

Dalam diskusi kami dengan Heru, beliau juga menyampaikan menge-



nai Inovasi Pengelolaan BMN yang menurut beliau termasuk upaya optimalisasi BMN yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan aspek kemanfaatan BMN, Meminimalisir BMN Idle dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi APBN yang diperuntukkan untuk pengelolaan BMN.

Kanwil DJPBn Prov. SumBar juga telah melakukan berbagai inovasi pengelolaan BMN seperti Melakukan optimalisasi BMN berupa tanah dan Rumah Negara yang bersifat idle pada satuan kerja Kanwil DJPb Sumbar untuk dialihgunakan ke satuan kerja Kementerian Keuangan lain yang membutuhkan sehingga BMN tersebut dapat optimal menunjang tugas dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan, dan juga melakukan sinergi dengan KPKNL setempat untuk melakukan kajian optimalisasi Pemanfaatan BMN

berupa asset tanah idle untuk disewakan kepihak ketiga sehingga memiliki manfaat sosial dan meningkatkan Perimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menutup perbincangan kami saat itu, Heru selaku Kepala Kantor Wilayah DJPBn Prov. SumBar sangat mengapresiasi inisiatif Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dalam menyelenggarakan BMN Award di tahun ini, semoga kedepan BMN Award dapat diperluas jenis apresiasinya seperti pada kategori inovasi pengelolaan BMN sehingga dapat lebih memacu seluruh satker Kemenkeu untuk lebih meningkatkan kualitas tatakelola BMN.

Teks: Jeri Martin

Foto: Ayu Damelia

Optimalisasi BMN dari Kota Kretek

“Rokok, mas”, ucap seorang supir travel menawarkan rokoknya. “Rokok apa itu, pak?”, tanyaku penasaran. “Ini rokok lokal sini, mas”, jawabnya. “Tapi udah ada cukainya ya, hebat”, sahutku takjub. “Banyak disini rokok-rokok lokal yang sudah bercukai. Yang masih ilegal juga ada sih, mas”.

Begitulah penggalan percakapan penulis dengan seorang supir travel di sebuah kursi warung kopi. Saat itu tim dari Biromadan baru saja sampai di salah satu kota penghasil kretek terbesar di Indonesia. Ya, kota Kudus merupakan salah satu kota yang memiliki industri rokok terbesar hingga dijuluki Kota Kretek. Tak tanggung-tanggung, tercatat pada Juni 2021, ada 114 pabrik rokok yang tersebar di kota Kudus, Pati dan sekitarnya.

Banyaknya produk rokok inilah yang membuat tantangan yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus semakin besar. Selain itu, banyaknya pabrik rokok yang tersebar di Kudus dan sekitarnya membuat cakupan wilayah kerja KPPBC TMC Kudus menjadi sangat luas. Total wilayah kerja KPPBC TMC Kudus seluas 5.741,5 km persegi mencakup seluruh wilayah eks karesidenan Pati, yang meliputi Kudus, Jepara, Pati, Rembang, serta Blora. Dengan luasnya cakupan



wilayah kerja ini juga mengharuskan KPPBC TMC Kudus untuk mengelola aset Barang Milik Negara yang sangat banyak yaitu lebih dari 1000 NUP. Namun tantangan dalam pengelolaan BMN mampu dihadapi oleh KPPBC TMC Kudus dengan baik. Bahkan pada akhir tahun 2021, KPPBC TMC Kudus mendapatkan penghargaan BMN Award 2021 kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN klasterisasi Satker Besar. Penghargaan ini merupakan bukti keseriusan KPPBC TMC Kudus dalam mengelola asetnya khususnya dalam utilisasi dan optimalisasi aset-aset miliknya. Menurut Sutopo selaku Plt Kepala KPPBC TMC Kudus, sudah ada pergeseran mindset terkait pengelolaan BMN yang dulunya hanya sebagai supporting, sekarang sudah mulai menjadi core dari sebuah instansi. Pada zaman sekarang, aset BMN tidak hanya menjadi pendukung

terselenggarakannya kegiatan perkantoran, namun juga dapat menjadi sumber penerimaan bagi negara. “Bea cukai kudu memiliki beberapa BMN khususnya tanah dan bangunan yang tidak hanya terletak di satu lokasi, antara lain tanah dan bangunan kantor yang diperuntukan untuk aktivitas kantor dan pos bantu yang berlokasi di Kudus, Blora, Jepara, dan Rembang. Serta rumah dinas yang berada di Kudus dan Jepara”, ucap Sutopo menjelaskan. “Saat ini Bea Cukai Kudus secara aktif menjalankan tuisi di gedung kantor yang berlokasi di Kudus. Namun untuk pos bantu, memang dulunya dipergunakan sebagai pos bantu Bea Cukai untuk mengawasi kegiatan pengangkutan antar pulau, tapi karena sekarang kegiatan tersebut sudah tidak dilakukan lagi, akhirnya bangunan tersebut tidak dipergunakan lagi atau idle”, tambahnya. Sutopo juga menjelaskan bahwa



telah dilakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang idle tersebut dengan pemanfaatan bangunan menjadi koperasi, pengalihan penggunaan terhadap 2 Unit Rumah Negara di Kab. Jepara, dan pengalihan status penggunaan berupa 2 Bangunan yaitu Pos Bantu di Jepara dan Rembang, serta pengembalian aset kepada Pengelola Barang yaitu Pos Bantu Juwana, Cepu dan Banyutowo. Penghargaan BMN Award menurut Sutopo tidak dapat diraih oleh KPPBC TMC Kudus tanpa adanya awareness seluruh pegawai terhadap pengelolaan BMN yang baik dan benar. “BMN merupakan asset yang penting bagi negara dan instansi pada khususnya. Karena dengan adanya BMN, sebuah instansi dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu menjaga BMN agar tetap bisa berfungsi dengan baik maka kita sebagai pengguna BMN harus menggunakan

dan memelihara dengan baik” tuturnya. “Tanpa adanya awareness maka akan memungkinkan munculnya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN sesuai peruntukan, bahkan kemungkinan ada kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan menyerobot kepemilikan BMN yang ada”, tambahnya. “Untuk saat ini kami masih akan menggali potensi BMN pada satker Bea Cukai Kudus untuk dapat dilakukan optimalisasi penggunaan maupun pemanfaatan BMN kedepannya”, tutup Sutopo dalam wawancaranya.

Teks & Foto: Indyashadi Satya

Memaksimalkan Konsep *Flexible Working Space* Melalui Pemerataan Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Komputer

Pemerintah telah menggaungkan penerapan *delayering* jabatan pada Kementerian/Lembaga. Sistem *delayering* akan memperbanyak jabatan fungsional yang kinerjanya mudah diukur dengan adanya angka kredit pegawai. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan mencanangkan gerakan *Flexible Working Space (FWS)* melalui KMK-223/MK.1/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja Di Lingkungan Kemenkeu. Meskipun dalam penerapannya, masih banyak aspek yang harus diperhatikan. Khususnya terkait dengan pemenuhan sarana kerja untuk penunjang pekerjaan berupa komputer/laptop bagi para pegawai. Sementara komputer/laptop menjadi sarana kerja yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai angka kredit yang dibutuhkan.

Berdasarkan data hasil sensus BMN Kemenkeu tahun 2019, jumlah BMN berupa komputer dan laptop di lingkungan Kemenkeu tercatat sebanyak

151.507 unit. Sedangkan jumlah pegawai Kemenkeu saat ini adalah 80.966 pegawai. Dengan rasio mendekati 1:2 (dua komputer/laptop untuk satu pegawai), menunjukkan kebutuhan sarana kerja komputer/laptop di lingkungan Kemenkeu seharusnya sudah terpenuhi. Namun pada prakteknya, masih banyak pegawai yang harus menggunakan perangkat pribadi tanpa ada kompensasi dari kantor. Dalam rangka melakukan pemerataan pemenuhan kebutuhan komputer, alternatif pertama dan utama yang harus dilakukan adalah mengoptimisasikan penggunaan komputer yang saat ini dimiliki. Namun berdasarkan data hasil sensus 2019, mayoritas komputer/laptop yang dimiliki satker adalah perolehannya sebelum tahun 2010. Jika melihat perkembangan teknologi, perangkat komputer dengan tahun perolehan tersebut sudah tidak optimal dan membutuhkan adanya peremajaan/pembaruan perangkat. Berbagai skema atau alternatif dapat diterapkan dalam rangka melakukan pembaruan perangkat komputer tersebut. Alternatif yang lazim adalah

dengan pengadaan/beli baru. Namun alternatif ini tidak dapat segera direalisasikan mengingat prosedur pengadaan sangat panjang, mulai dari perencanaan di RKBMN, RKKL, sampai tahapan pengadaan itu sendiri. Alternatif berikutnya, yang saat ini juga sudah mulai diterapkan di lingkungan Setjen adalah sewa komputer. Sewa komputer memiliki kelemahan dalam hal harga sewa yang mahal, karena di dalamnya ada jaminan dari penyedia terkait biaya pemeliharaan maupun penggantian dalam hal terjadi kerusakan yang tidak disengaja. Selain itu, mekanisme sewa mewajibkan tanggung jawab atas kerusakan di luar yang disebutkan di kontrak kepada tiap-tiap pegawai yang menggunakan perangkat. Sehingga membuat pegawai kurang nyaman untuk menggunakan komputer sewa secara mobile. Alternatif lain yang bisa dilakukan namun belum pernah diterapkan di entitas pemerintah pusat adalah mekanisme tunjangan komputer. Tunjangan komputer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana kerja berupa komputer/laptop bagi seluruh pegawai secara adil dan merata. Dengan diberikan tunjangan komputer, maka sarana kerja tersebut menjadi milik pribadi pegawai. Tunjangan komputer berisikan komponen sekurang-kurangnya adalah biaya pembelian komputer/laptop dan biaya pemeliharannya. Pada konsep tunjangan komputer, tunjangan diberikan setiap bulan kepada seluruh pegawai dengan nominal sebesar nilai standar perolehan komputer/laptop ditambah dengan estimasi biaya-biaya pemeliharaan yang dibutuhkan, dibagi dengan masa manfaat selama 4 tahun. Dengan asumsi harga laptop standar adalah 10 juta dan biaya pemeliharaan selama 4 tahun adalah 2 juta, maka besaran tun-

jangan laptop per bulan per pegawai sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 250.000 $((10.000.000+2.000.000)/48)$. Tunjangan komputer memberikan terobosan yang mudah, murah, dan terukur untuk mengatasi masalah pemenuhan sarana kerja menuju era FWS. Tunjangan komputer dapat mengurangi biaya pemeliharaan perangkat kerja karena biaya tersebut sudah melekat ke komponen tunjangan. Besar biaya yang harus dikeluarkan cenderung lebih terukur dibandingkan dengan mekanisme pengadaan yang besarnya mengikuti harga pasar dan ketersediaan anggaran. Berikut perbandingan biaya dari mekanisme pengadaan, sewa, dan tunjangan komputer jika diterapkan di lingkungan Setjen dengan total pegawai adalah 2.695 pegawai.

Biaya paling murah yang dikeluarkan adalah melalui mekanisme pengadaan. Sedangkan untuk paling mahal adalah mekanisme sewa. Pada skema pengadaan, terdapat biaya lain-lain yang sulit teridentifikasi pada tahun-tahun berikutnya setelah pengadaan. Biaya tersebut meliputi biaya-biaya pemeliharaan atau biaya-biaya penggantian atas BMN yang rusak atau hilang.

Butuh jalan yang panjang untuk dapat mengimplementasikan ide tunjangan komputer ini. Selain memerlukan landasan hukum dan aturan-aturan pendukung lainnya, implementasi tunjangan komputer juga memerlukan kajian dari ketersediaan anggaran. Mengingat alternatif ini akan memindahkan alokasi belanja, dari sebelumnya belanja modal (pengadaan) atau belanja barang (sewa) menjadi belanja pegawai. Namun, dengan adanya implementasi tunjangan komputer dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ditemui seperti:

- a. Pemeraataan pemenuhan kebutuhan sarana kerja berupa komputer/laptop
- b. Mengurangi beban pengelolaan dan penatausahaan BMN berupa komputer/laptop
- c. Meminimalisir potensi keilangan BMN berupa komputer/laptop
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi belanja modal.

Teks: Agus Warsito

Foto: Jeri Martin

Membangun Paradigma *Asset Manager* Dalam Pemanfaatan Barang Milik Negara

PERKEMBANGAN PARADIGMA

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 6/2006). Pada awal implementasinya, pemerintah pusat masih fokus melakukan pembenahan pencatatan BMN untuk mendukung akuntabilitas penyajian aset dalam neraca pemerintah. Dari pertama kali disusun (2004), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan tahun 2008. Pemerintah terus bekerja keras untuk lepas dari disclaimer melalui penataan sistem pencatatan sehingga pada tahun 2009, LKPP mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Upaya penyajian ulang nilai awal aset berupa BMN di neraca atau yang dikenal dengan penilaian kembali giat dilaksanakan sebagai bentuk pembenahan administrasi BMN, sehingga akuntabilitas penyajian nilai aset dalam laporan keuangan menjadi wajar. Periode pembangunan tatanan administrasi pencatatan BMN ini dikenal dengan era asset administrator. Hal itu termaktub dalam storyline perjalanan

pengelolaan BMN di Indonesia (Paparan Widyaiswara Ahli Utama berjudul "Optimalisasi Aset: Penguatan dan Arah Rancangan Teknokratik Renstra Kemenkeu RI 2020-2024, Yujana, 2019) Dinamika perkembangan zaman menuntut BMN dapat memberikan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (value added). Untuk memberikan nilai tambah tersebut, perubahan paradigma perlu dilakukan. Paradigma asset administrator yang menekankan terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum bergeser menjadi paradigma asset manager yang menekankan pada penggunaan tertinggi dan terbaik dari BMN (highest and best use), revenue center, dan cost efficiency.

TIGA KONSEPSI ASSET MANAGER

Untuk menerjemahkan paradigma asset manager, perlu diikuti dengan implementasi dari masing-masing konsep tersebut. Pertama, konsep highest and best use (HBU) atau penggunaan tertinggi dan terbaik. Konsep ini merupakan konsepsi manajemen properti di mana suatu aset dilihat dari penggunaan yang paling mungkin dan optimal, baik itu secara fisik dimungkinkan dan telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara

finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Analisis HBU pada prinsipnya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan melakukan identifikasi mengenai penggunaan terbaik dari BMN (dalam hal ini lahan) yang dapat menghasilkan nilai yang paling optimal. Kedua, konsepsi bahwa BMN diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan negara non pajak dari skema pengelolaan BMN yang dilakukan (revenue generating). BMN diharapkan tidak lagi menjadi beban keuangan negara tetapi justru menjadi pusat pendapatan (revenue center). Sementara konsepsi ketiga terkait dengan cost efficiency, diharapkan pengelolaan BMN mampu mereduksi eksposur anggaran belanja negara melalui kreativitas pemenuhan kebutuhan BMN non-anggaran dan efisiensi penggunaan belanja dalam pengelolaan BMN.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Mendudukan paradigma asset manager pada tataran implementasi tidak semudah membalik telapak tangan. Jika ditilik dari profil BMN yang dikelola, tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, di mana Ernst & Young Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan, bahwa masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan BMN di Indonesia, di antaranya:

1. Proses penatausahaan, pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan BMN belum optimal;
2. Kurangnya insentif dan aplikasi pendukung yang memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN secara efisien;
3. Tidak adanya proses bisnis yang terkait dengan penyiapan laporan informasi Sumber Daya Alam (SDA)

untuk mendukung proses penetapan peraturan dan kebijakan;

4. Kurangnya aplikasi pendukung yang menyediakan informasi yang lengkap dan valid terkait BMN (sebagai suatu sumber kebenaran); dan
5. Proses rekonsiliasi laporan BMN masih dilakukan secara manual.

Sementara itu, harapan BMN untuk lebih berkontribusi kepada negara semakin meningkat. Dalam dokumen Analisis Keberlangsungan Fiskal Jangka Panjang disebutkan bahwa dalam arah kebijakan makro, upaya optimalisasi aset negara sebagai revenue center menjadi salah satu bagian dalam mendorong penerimaan negara non pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada saat memberikan kuliah umum di FEB UGM pada tahun 2018, juga pernah menyampaikan statement beliau bahwa: “Di negara maju, tidak ada uang, barang, dan modal yang menganggur, semuanya dipaksa bekerja keras untuk menghasilkan nilai. Kita harus bisa seperti itu, jangan sampai ada satu barang pun yang dibiarkan begitu saja”. Tantangan ini tentu saja sangat menarik melihat realisasi dari penerimaan negara non pajak (PNBP) dari pengelolaan BMN masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara”.

PERUBAHAN YANG DILAKUKAN

Perubahan fundamental dalam pengelolaan BMN telah berjalan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pokok-pokok perubahan yang terdapat dalam PP 28/2020 di antaranya pengaturan mengenai pemindahtanganan, pemanfaatan, dan penilaian BMN. Istilah baru dari sisi pemanfaatan BMN yaitu kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

PEMANFAATAN BMN

Seiring dengan semangat pemanfaatan BMN yang lebih baik melalui perubahan regulasi tersebut, Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang mengupayakan transformasi paradigma pengelolaan aset dari yang semula bersifat asset administrator menjadi asset manager melalui kebijakan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020, pemanfaatan BMN merupakan pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Perbaikan pemanfaatan BMN yang saat ini diberlakukan adalah terkait perbaikan tata kelola dan simplifikasi pemanfaatan BMN. Regulasi ini mengatur secara lebih tegas dan detail mengenai Tata Kelola Pemanfaatan BMN, sehingga tujuannya tidak lagi terjadi penafsiran ganda dan keraguan bagi K/L dalam mengelola BMN yang dikuasakan. Dengan adanya penyempurnaan aturan terkait pemanfaatan BMN, akan mendorong peningkatan kesadaran Kementerian/Lembaga selaku pengguna BMN untuk senantiasa mengelola BMN dengan sebaik-baiknya serta mengoptimalkan pemanfaatan BMN idle yang dikuasainya demi meningkatkan PNBP. Di sisi lain, counterpart terkait yaitu: Pemerin-

tah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BLU, Perseroan Terbatas, Badan Hukum, Koperasi, Swasta dan masyarakatpun juga dapat mempunyai akses untuk menyumbang PNBPN dalam kerangka pemanfaatan BMN tersebut dan jangan biarkan aset negara kita tertidur dan tidak menghasilkan manfaat, termasuk pada masa pandemi.

Sedangkan simplifikasi yang dilakukan adalah adanya penggabungan dan penyempurnaan tiga aturan terkait pengelolaan BMN sebelumnya, yaitu PMK 78/2014, PMK 164/2014, dan PMK 57/2016 (meringkas total 313 Pasal 44 Bab menjadi total 107 Pasal 10 Bab). Skema pemanfaatan BMN yang baru diatur yaitu Skema Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Sedangkan skema Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Penyediaan Infrastruktur (KSPI) secara lebih lanjut disempurnakan. Pemanfaatan BMN guna penanganan kondisi bencana alam, non alam, dan bencana sosial dengan cepat dan tepat juga telah diatur dalam regulasi ini.

EPILOG

Semua substansi tersebut diharapkan akan sangat mendukung penggunaan BMN dalam paradigma manajer aset yang mampu mengelola BMN yang dimiliki Pemerintah secara tepat sasaran, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, terciptanya value added antara lain melalui cost saving, dan tentunya diharapkan juga membantu optimasi penerimaan negara dalam bentuk kontribusi kepada PNBPN.



Teks: Lucky Akbar

Foto: Jeri Martin

Mencicipi Kelezatan Nusantara dari Sumatera Utara

Hai! Sobat Info Pasti kali ini tim Info Pasti mengunjungi salah satu kota terbesar di Indonesia, Kota Medan. Kota yang identic dengan suku Batak ini memiliki keragaman budaya dan keindahan alam. Selain itu, Medan juga merupakan kota Multikultural dengan keragaman yang masih banyak menyimpan cerita unik yang belum banyak diketahui oleh khalayak luas.

Kalo soal kuliner, tak perlu diragukan lagi di Medan kita akan menjumpai banyak sekali kuliner lezat. Tim Info pasti mencicipi sedikit dari banyaknya ragam kuliner di kota Medan.

MIE ACEH TITI BOBROK

Siapa yang tak kenal mie yang sudah melegenda ini. Soal rasa tak perlu diragukan lagi. Mie Aceh tersohor di kota Medan ini terletak di Jalan Setia Budi, nomor 17D Kota Medan. Dari dahulu Mie Aceh Titi Bobrok ini paling diburu wisatawan Kota Medan. Terutama menu Mie Aceh Kepiting dan Mie Aceh Udang di Mie Aceh Titi Bobrok. Kedua menu itu, menjadi favorit dan selalu sering dipesan wisatawan yang datang ke tempat ini.

NASI GORENG KOMDAK

Salah satu nasi goreng yang terkenal di Medan adalah "Nasi goreng Komdak". Disebut nasi goreng Komdak karena memang lokasinya dulu dengan Komdak (Komando Daerah Kepolisian) sekarang sudah jadi Sun Plaza. Lokasi tepatnya adalah di jl Zainul Arifin di depan Kuil Hindu. Nasi Goreng Komdak menawarkan hidangan nasi goreng spesial terbaik dengan resep khas. Terdapat beberapa pilihan menu seperti nasi goreng sederhana, nasi goreng pedas, dan goreng telur. Satu porsi nasi goreng disini di tawarkan dengan harga terjangkau, tersedia tempat yang nyaman untuk makan dan pelanggan juga bisa memesan nasi goreng untuk di bawa pulang (dibungkus).

SOTO SINAR PAGI

Soto Medan legendaris yang tak lengakng oleh waktu. Ciri khas dari Soto Medan sendiri yaitu kuahnya kental yang berwarna kuning. Karena terdapat kandungan santan dengan perpaduan rempah-rempah Indonesia. Yaitu; bumbu jinten, pala, kunyit, dan lengkuas yang membuat Soto Medan kaya akan rasa.

Lokasi RM Sinar Pagi berada di Jalan. Sei Deli, No. 2D, Silasas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Buka setiap hari pada pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB. Untuk di hari Minggu tutup di pukul 15.00 WIB. Soto RM Sinar Pagi ini menawarkan beragam pilihan isian soto. Antara lain soto ayam, soto daging, soto babat, usus, paru, hati, dan soto dengan isian campuran.

Soto RM Sinar Pagi adalah salah satu sajian kuliner di Kota Medan yang tidak boleh dilewatkan jika kamu sedang berkunjung ke Kota Medan

ES KRIM RIA

Ada Sejak 1936, Es Krim Ria Jadi Saksi Perubahan Kota Medan. Salah satu es krim legendaris di Kota Medan adalah Es Krim Ria. Es krim yang berlokasi di Jalan Surabaya ini setiap hari buka pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Harga mulai Rp 22 ribu - Rp 34 ribu.

Kalau menu yang sangat khas dari Es Krim Ria ini adalah Es Krim Soda dan Es Krim Buah. Penamaan Es Krim Ria sendiri didasarkan pada kata ria, yang diasosiasikan sebagai ungkapan bahagia. Harapan pendiri kedai es krim ini, setiap pengunjung yang datang ke Es Krim Ria bisa merasakan bahagia setelah mencicipi es krim yang mereka sajikan.

Nah! bagaimana sobat info pasti, penasarankan dengan rasa dari kuliner-kuliner diatas? Jangan lupa kalau berkunjung ke sana, cobalah untuk menikmatinya. Ada yang bilang, belum dikatakan benar-benar ke suatu daerah bila belum mencoba kulineranya.

Teks & Foto: Jeri Martin

Ruang Kerja Kolaborasi Kementerian Keuangan

Cara bekerja pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Sejak tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menginisiasi ruang kerja kolaboratif dalam konsep Activity Based Workplace (ABW) dimana diharapkan seluruh kebutuhan ruang kerja pegawai dengan berbagai macam aktivitasnya dapat terpenuhi dalam mendorong optimalnya budaya kerja yang agile, fleksible, responsive, aman dan nyaman bagi pegawai.

Ruang kerja kolaboratif yang dimiliki Kemenkeu, hal ini merupakan suatu tata kelola atas ruang atau aset yang sangat baik. Dimana suatu ruang atau aset tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh banyak pegawai di Kemenkeu. Ruang Kerja Kolaboratif merupakan cara kerja dengan berprinsip yaitu: (i) borderless organisasi yaitu penerapan organisasi tanpa sekat dengan memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola kerja matriks dan squad, (ii) kebijakan delay-ering yang modern yang berdampak pada efisiensi SDM, (iii) harmonisasi, penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi dalam memenuhi kebutuhan

organisasi, (iv) penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang menjawab tantangan disrupsi, (v) Penyediaan collaboration tools yang user centric, serta (vi) pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools. Pemanfaatan ruang bersama diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pegawai maupun organisasi kementerian keuangan itu sendiri, bagi pegawai diantaranya ada beberapa hal yang akan bermanfaat Dapat berkonsentrasi penuh pada pekerjaan, Lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja, Lebih aktif, tidak hanya duduk di belakang meja, Dapat berkolaborasi serta berbagi ide, pengetahuan dan keterampilan, Lebih kreatif dan inovatif, Memperoleh kepuasan kerja, dan Memperoleh keseimbangan kerja dan leisure. Sedangkan bagi organisasi Kemenkeu dapat diperoleh manfaat diantaranya Penghematan biaya operasional seperti biaya sewa kantor, peralatan kantor, listrik, peningkatan komitmen dan loyalitas pegawai, dan peningkatan produktivitas dan inovasi Ruang kerja kolaboratif merupakan tata ruang kerja masa depan yang memiliki 5 aspek utama yaitu;

1. Penataan ruang kerja dengan konsep Activity Based Workplace (ABW), sejak tahun 2019 telah di implementasi-



kan di lingkungan Kemenkeu baik pusat maupun daerah yaitu pada 11 Unit Pusat: 43 unit kerja dan pada Unit Daerah: 26 unit kerja

2. Penggunaan ruang kerja bersama, (Satellite Office dan Co-Working Space), telah diimplementasikan Satellite Office: 3 Kantor (KPPN Bogor, Kanwil Bea dan Cukai Banten dan PKN STAN) dan Co-Working Spaces 8 (delapan) kantor

3. Penggunaan ruang rapat bersama (SIMARU), Telah di Implementasikan Ruang Rapat Bersama yang terdaftar pada SIMARU data per 28 September : 560 ruang rapat

4. Penggunaan ruang layanan bersama, implementasinya berupa penyediaan ruang layanan Bersama di gedung Juanda II dan Gedung Soetikno Slamet dimana pelayanan untuk beberapa kebutuhan layanan terkait ada dalam satu ruang layanan

5. Penggunaan hunian bersama dengan konsep Rusunara progress implementasi telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Rusunara (antara PUPR dan Kemenkeu) dan diresmikan oleh Ibu Menteri Keuangan

Dari sisi fisik, diharapkan seluruh ruang kerja di Kemenkeu dibangun untuk mendorong terciptanya produktivitas dan kreativitas dalam bekerja. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak selalu harus melibatkan anggaran yang sangat besar. "Jajaran di Kementerian Keuangan menganggap semua gedung dan ruangan adalah milik bersama, kita masuk ke ekonomi yang disebut share ekonomi, ekonomi yang sebetulnya saling menggunakan bersama.

Ekonomi ini akan semakin menuju kepada efisiensi, dimana tidak hanya ruang fisik seperti ini yang bisa dipakai bersama, services atau pelayanan pun bisa bersama", terang Menteri Keuangan dalam peresmian Ruang Kerja Kolaboratif Kemenkeu. Dari sisi pelaksanaan pekerjaan bahwa manusia, mindset, dan budaya merupakan tiga hal terpenting yang perlu difokuskan dalam transformasi, dan transformasi ini perjalanan menuju kepada kondisi yang diharapkan membutuhkan waktu transisi dan juga potensi retensi masih ada, untuk itu salah satu hal penting dalam mendorong optimalnya penggunaan ruang kerja kolaboratif ini dibutuhkan peran semua pihak di lingkungan Kementerian Keuangan mulai dari jajaran pimpinan hingga staff.

Daftar Pustaka

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kemenkeu-usung-ruang-kerja-kolaboratif/>

Teks: Tantan

Foto: Jeri Martin

Poin Perubahan Kebijakan

PERPRES NO.12 TAHUN 2021

01

USAHA MIKRO KECIL, KOPERASI DAN PRODUK DALAM NEGERI

Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Program prioritas Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dan Produk Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Fiskal Tahun 2021.

Untuk Usaha Mikro dan Kecil Pemerintah Daerah wajib menyediakan produk paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Mulai Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai kontrak anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000 diperuntukan bagi usaha kecil dan

jatau koperasi.

Mulai paket pengadaan pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang termasuk pemenuhan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah harus menyediakan produk usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

Usaha Kecil



**Kelompok Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 75**

39. Setiap UKPB wajib mematuhi standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh peternak/lembaga di bidang Pengadaan Barang/Jasa
40. Pendekatan UKPB dikawalikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPB
41. UKPB Kemendagri dan Lembaga Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kompetensi UKPB melalui model kemitraan UKPB untuk meningkatkan keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
42. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPB dan pelaksanaan peningkatan kompetensi UKPB melalui model kemitraan UKPB diatur dalam Peraturan UKPB

UKPB: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

**03 PELAKU
PENGADAAN**

KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Pasal 5 Ayat 1

sebelum:

1. PA memiliki kewenangan anggaran karena mempunyai fungsi:
 1. Menetapkan PPKB/PPK

perubahan:

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
 1. Menetapkan penggunaan Sarana Datar Hitam

PEJABAT PENBUAT KOMITMEN (PPK)

Pasal 10 Ayat 5

sebelum:

5. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA harus menunjuk sebagai PPK

perubahan:

5. PPK pada Perangkat Daerah yang Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Perangkat Daerah yang dapat menunjuk sebagai PPK

Pasal 11

sebelum:

1. PPK dalam Pengadaan Sarana/Jasa memiliki tugas:
 1. Menetapkan anggaran rencana

perubahan:

1. PPK dalam Pengadaan Sarana/Jasa memiliki tugas:
 1. Menetapkan anggaran rencana

Pasal 11

sebelum:

1. Dalam hal tidak ada persetujuan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran di bawah APBD, PPK/PK yang mengajukan PPK untuk melaksanakan tugas PPK wajib melakukan tindakan yang diperlukan sampai berhasil.
2. PPK yang melaksanakan tugas PPK wajib mematuhi persyaratan kompetensi PPK.

perubahan:

1. Dalam hal tidak ada persetujuan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran di bawah APBD, PPK/PK yang mengajukan PPK untuk melaksanakan tugas PPK wajib melakukan tindakan yang diperlukan sampai berhasil.
2. PPK yang melaksanakan tugas PPK wajib mematuhi persyaratan kompetensi PPK.

POKJA PEMILIHAN

Pasal 13 Ayat 1

sebelum:

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk ketakausahaan;

perubahan:

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia sesuai Eselon masing-masing Pengadaan Langsung & Ditugas;

Pj/PHP/PPHP

Pasal 1 angka 4 dan 15

Pengadaan dalam Pj/PPHP/PPHP

Pasal 8 huruf g

Pengadaan Pj/PPHP/PPHP dan Paket Pengadaan

Pasal 9 ayat 1 huruf a

Pengadaan melalui Pj/PPHP/PPHP dan Pj/PPHP

Pasal 11

Pengadaan yang ditawarkan Pj/PPHP/PPHP

Pasal 13

Pengadaan dengan kriteria acuan dan Pj/PPHP/PPHP

Pasal 58

sebelum:

1. PPK mengorganisir dan mengelola kegiatan PPK/PPK.
2. PPK/PPK mematuhi Pj/PPHP/PPHP untuk melakukan penyelenggaraan administrasi dan teknis pelaksanaan pengadaan di bawah APBD.
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam bentuk fisik.

perubahan:

1. PPK mengorganisir kegiatan jasa kepada Pj/PPHP/PPHP.
2. Sewaktu bekerja harus berada dalam bentuk fisik.

04 PEMILIHAN PENYEDIA DALAM JASA KONSTRUKSI

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Jasa Konstruksi Berdasarkan Anggaran Kesehatan

Pemilihan Penyedia di lingkungan dalam Raster Pekerjaan HPP tentang Pemilihan penyedia

Dalam Raster No. 12 Tahun 2021 telah pengumuman telah terbit dari Jawa Timur

05 PEMBINAAN PENYEDIA

PENGATURAN TENTANG SANKSI DAN DAFTAR HITAM

Dasar Hukum Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2021 yang mengatur tentang Daftar Hitam dan sanksi terhadap dalam Peraturan Kesehatan

Isi Terkait Pembinaan Pembinaan setelah dilakukan oleh instansi yang berkompetensi masing-masing yaitu oleh Kementerian Kesehatan dan BPPK-UKM oleh Kementerian PPPK dan Komisi Pemilihan Umum

REFORM ATAS SANKSI DAFTAR HITAM

DATA PERANGKANYA SANKSI DAFTAR HITAM TA 2019

318

jumlah Terkena Sanksi Daftar Hitam Tahun 2019

REPERFORMAN SANKSI DAFTAR HITAM:

303

jumlah yang telah melaksanakan perbaikan, baik melalui proses penyelesaian masalah pemerintah dan melalui proses penyelesaian PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa

~92%

Reformasi Daftar Hitam

KONSISTENSI DALAM PENJAJARAN SANKSI

Konsistensi dalam penjabaran sanksi BPPK BPPK dan BPPK yang dilakukan oleh instansi yang berkompetensi

SEBANYAK SANKSI

318 sanksi, daftar hitam yang terdapatnya merupakan angka

KRITERIA PENGENAAN SANKSI DAFTAR HITAM

Berdasarkan Pasal 78 dan 80



ETIK

Menghasilkan Dokumen Kebijakan
Pelayanan Publik
Terdapat Persepsi Masyarakat
Tentang K4B



NOM ETIK

Menggunakan tidak sah

06 E-PURCHASING DAN KATALOG ELEKTRONIK

E-PURCHASING

Pasal 30 ayat 31

sebelum

28. Pembelian secara elektronik yang secara nyata dilakukan E-Purchasing melalui cara cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

perubahan

28. Pembelian secara elektronik yang secara nyata dilakukan E-Purchasing adalah pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau lainnya.

Pasal 32

sebelum

2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, kualitas, merk, TMM, produk dalam negeri, modal lokal, produk industri hulu, manufaktur, harga per satuan volume, dan lain-lain yang sesuai dengan jenis...

3. Pemeliharaan produk yang dikomunikasikan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah, and berbagai Pihak dan/atau Swasta atau APN

4. Pemeliharaan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode

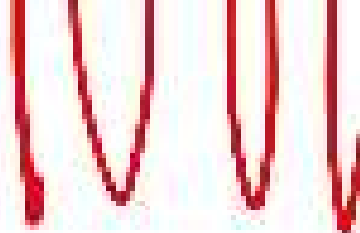
- a. Langsung atau
- b. Tidak langsung

perubahan

2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TMM, produk dalam negeri, produk industri produk rumah lingkungan hidup, kesehatan, pangan, Perpetua dan lain-lain melalui harga per satuan volume

5. Pengelolaan katalog elektronik dilakukan secara oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah atau APN

4. Dihapus.



TOKO DARING

Pasal 30 ayat 5

revisi

5. E-purchasing tidak termasuk untuk Barang/Bekas-
jian Kementerian/Prinsipal/Instansi yang sudah terman-
takan dalam katalog elektronik.

perubahan

3. E-purchasing tidak termasuk untuk Barang/Bekas-
jian Kementerian/Prinsipal/Instansi yang sudah terman-
takan dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Pasal 1 angka 53

53. Toko Daring adalah layanan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi
pengadaan barang/jasa melalui perantara secara online yang melalui sistem elektronik dan tidak langsung.

Pasal 24

1. Barang/jasa yang ditawarkan melalui Toko Daring memuat informasi:
a. spesifikasi atau spesifikasi lain;
b. nama file atau nama file;
c. harga atau referensi di pasar.
2. Barang/jasa tidak disajikan pada katalog elektronik.
3. Ketentuan lain terdapat dalam Toko Daring di bawah Peraturan LKPP.

“

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu aktivitas dalam mendorong perekonomian nasional baik secara nasional maupun daerah. Untuk itu diperlukannya payung-
kebijakan yang terus berkembang dan aktual sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

”

Informasi lebih lengkap tentang Perpres 12/2021 dapat dilihat melalui tautan berikut ini :
<https://jdih.kpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomer-12-tahun-2021>



#LAYANAN TANPA BIAYA!



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2020

Registrasi dan Verifikasi: **4.53/5**

Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.73/5**

Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.68/5**

Asistensi Pengadaan: **4.85/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp
0852 1740 4522



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#PastikanAsetKita #RomadanZIWbKWBBM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

// ZONA
INTEGRITAS
Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) 35
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Bela Pengadaan

Langkah Besar Untuk Usaha Kecil

Beberapa hari lalu, saya membeli suatu barang di toko ritel perkakas yang cukup punya nama di Indonesia. Saat akan membayar, sang kasir menanyakan apakah saya sudah menjadi member di toko ritel tersebut. Mengingat saya sudah seringkali ditawarkan dan mendaftar sebagai member di berbagai toko ritel. “Mumpung gratis”, pikir saya. Namun ternyata saya lupa apakah saya pernah terdaftar di toko tersebut atau tidak. Kemudian, kasir mengarahkan saya untuk mencatat nama dan tanggal lahir dan diberikan ke bagian customer service. Butuh waktu lama mencari data membership di *database* mereka, sampai-sampai pegawai di *customer service* tersebut bergumam ke rekan sebelahnya, “emang ga ada cara yang lebih cepat dan gampang ya? *Barcode* gitu?”. Saya sebagai *customer* yang cukup menunggu lama tersenyum karena sepertinya merasa pegawai tersebut mendengar isi hati saya.

Dari sana saya melihat bahwa semakin berkembangnya teknologi sampai dengan saat ini, yaitu teknologi 4.0, menuntut kita untuk beradaptasi dalam memberikan cara yang mudah dan cepat untuk pengguna layanan atau pelanggan kita. Seperti slogan yang sering kita dengar, “Beradaptasi atau tertinggal?”. Begitu juga dengan pemerintah. Tuntutan yang besar dari masyarakat sebagai

pemangku kepentingan yang utama, mengharuskan adanya perubahan pola pikir, birokrasi serta sistem tata kelola pemerintahan ke arah yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Berbagai aplikasi pemerintahan telah dikembangkan di berbagai lini dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan utama pemerintah, termasuk di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Belanja pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu harapan agar pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi bisa bangkit kembali, khususnya akibat dampak pandemik Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa sebanyak 40% UMKM terancam berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, padahal UMKM berkontribusi sekitar 60% dari produk domestik bruto Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar roda ekonomi terus berjalan. Salah satu fokus pemerintah adalah menyelamatkan sektor UMKM yang kali ini terimbas cukup dalam, dengan cara mendorong belanja pemerintah melalui UMKM serta menaikkan batasan nilai pengadaan yang dapat diikuti oleh UMKM dari sebelumnya 2,5 Milyar menjadi sampai dengan 15 Milyar.

Menurut data LKPP, potensi pasar pengadaan pemerintah untuk usaha mikro dan kecil adalah sebesar Rp307 triliun atau sekitar 41% dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2020. Salah satunya Aplikasi Bela Pengadaan yang merupakan aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) yang bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau untuk pengadaan yang selama ini menggunakan Bukti pembelian/ pembayaran maupun kuitansi. Dibangun dan diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai wujud nyata usaha pemerintah dalam mewujudkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai kebijakan strategis Cipta Kerja dalam memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) serta kemudahan berusaha, Aplikasi Bela Pengadaan telah hadir untuk menghimpun para pelaku UMK untuk bergabung dalam Marketplace yang akan membantu dalam meningkatkan penjualan UMK, khususnya pada masa pandemi covid-19 melalui belanja pemerintah.

Program Bela Pengadaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan UMK go digital, pengadaan yang inklusif dan implementasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Kepala LKPP No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Untuk selanjutnya Program Bela Pengadaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 168 Tahun 2021 tentang Program Bela Pengadaan. Bela Pengadaan merupakan suatu langkah dan terobosan LKPP dalam menyediakan wadah bagi para UMK dalam melakukan penjualan secara daring/*online* melalui kerja sama dengan *e-Commerce* (Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik) yang bergabung di dalam sistem. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin mendorong UMK lebih banyak mengandalkan transaksi digital (UMK *Go Digital*). Terlebih, pada situasi pandemi saat ini transaksi daring/*online* lebih banyak dilakukan oleh konsumen. Berdasarkan outlook belanja pengadaan 2020-2021 pada laman: www.sirup.lkpp.go.id, belanja pengadaan pemerintah baik melalui APBN dan APBD mencapai sekitar 800 – 1.000 trilyun setiap tahunnya.

Belanja pengadaan terdiri dari belanja melalui penyedia, swakelola, maupun penyedia dalam swakelola. Sedangkan untuk pengadaan melalui penyedia dan swakelola dapat dilaksanakan melalui beberapa metode antara lain melalui metode: *e-purchasing*, pengadaan langsung, tender/seleksi, penunjukan langsung, dengan kriteria atau ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Jika kita lihat pada tabel 1 bahwa Bela Pengadaan dibangun oleh LKPP sebagai salah satu alternatif meng-elektronikan proses pengadaan langsung di bawah 50 juta tersebut, ke dalam suatu aplikasi. Tujuan Program Bela Pengadaan antara lain:

1. Mendorong UMK Go Digital dengan bergabung bersama Marketplace;
2. Menjadikan pengadaan lebih inklusif;
3. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
4. Memanfaatkan Marketplace dalam PBJP;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.

Pertanyaannya, apakah seluruh aplikasi tersebut, termasuk Bela Pengadaan, sudah cukup memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal kemudahan dan kecepatan layanan sebagaimana harapan pengguna?

Dalam berbagai kesempatan ketika saya pernah mengabdikan sebagai helpdesk/call center layanan pengadaan, tidak jarang saya menemukan keluhan mengenai banyaknya aplikasi yang dibuat namun tidak terintegrasi satu sama lain, khususnya jika dikaitkan dengan mekanisme pengadaan mulai dari perencanaan pengadaan, pengadaan/pemesanan, pengiriman, perpajakan sampai dengan pembayaran dan *complaint handling*.

Pada saat perencanaan pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mendelegasikan anggaran sesuai POK kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk selanjutnya dilakukan pemaketan pada aplikasi SI-UKPBJ/SIRUP. PPK dapat memilih metode Pengadaan Langsung untuk

seluruh paket yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Bela Pengadaan atau aplikasi sejenis yang serupa seperti Digipay dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan dalam Perpres. Selanjutnya pada aplikasi Bela Pengadaan, LKPP selaku pengguna sistem berusaha menghubungkan antara aplikasi pengadaan dengan pengguna yang berasal dari satuan kerja ke *Marketplace/e-Commerce* yang umum digunakan secara umum oleh pengguna jasa di Indonesia sebagai mitra Bela Pengadaan. Untuk masuk ke dalam aplikasi Bela Pengadaan, pengguna dapat mengakses ke URL: <https://belapengadaan.lkpp.go.id> melalui browser. Pengguna dapat memilih jenis barang/jasa pada Marketplace yang terdapat di aplikasi. Sampai dengan saat ini, LKPP telah bekerja sama dengan enam *e-Commerce* yang telah menjadi mitra yaitu: Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan Shopee. UMK dapat bergabung dengan *e-Commerce* tersebut agar barang/jasa mereka dapat dipilih oleh pengguna jasa melalui Bela Pengadaan. Sedangkan untuk pelaku usaha lokal yang sebelumnya sering menyediakan kebutuhan satuan kerja dalam waktu mendesak namun belum bergabung ke enam *e-Commerce* tersebut, bersiap-siap “mengelus dada” karena proses pendaftaran calon penyedia berada di kewenangan masing-masing *e-Commerce*. Selain itu, berdasarkan pengalaman dari satuan kerja bahwa riilnya harga yang terdapat di aplikasi Bela Pengadaan menjadi lebih mahal ketimbang harga beli langsung ataupun harga yang terpampang di tampilan halaman *e-Commerce* tersebut secara langsung. Sedangkan untuk metode pembayaran yang dapat digunakan dalam Bela Pengadaan, adalah melalui pembayaran

dengan uang tunai melalui Uang Persediaan atau dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pembayaran transaksi Bela Pengadaan dilakukan setelah pemesanan barang/jasa selesai dilakukan. Dalam transaksi pada Bela Pengadaan, 1 (satu) Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat didaftarkan untuk beberapa Pengguna (PPK/PP/ yang didelegasikan). Proses pendaftaran harus melalui mekanisme pelaporan kepada KPA terkait sesuai yang diatur oleh regulasi KKP dan Bank Penerbit KKP, menerbitkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PA/KPA dan dikirimkan kepada LKPP untuk kemudian LKPP meneruskan informasi tersebut kepada pihak Marketplace untuk didaftarkan sebagai akun KKP yang dipakai bersama. Pembayaran transaksi Bela Pengadaan dilakukan setelah pemesanan barang/jasa selesai dilakukan

Bagaimana mekanisme pengenaan pajak pada aplikasi ini? Apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, maka transaksi berapapun tidak dipungut PPh oleh Bendahara Instansi. Tapi apabila menggunakan Tunai (UP/ Uang Persediaan) atau *Cash on Delivery* (COD) maka untuk saat ini, transaksi yang tidak dipungut PPh dibatasi untuk transaksi di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selain itu, PPh tidak dipungut/potong dari Wajib Pajak

orang perorangan yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi melalui www.pajak.go.id. Adapun mekanisme perpajakan untuk transaksi yang nilainya lebih dari 2 juta rupiah dapat mengikuti peraturan perundang-undangan terkait perpajakan. Pada fasilitas aplikasi, pengguna dapat menambahkan secara manual nilai PPh untuk transaksi di atas 2 juta rupiah tersebut. Namun, untuk PPN secara otomatis oleh *e-Commerce* dikenakan untuk seluruh jenis barang/jasa yang terdapat di aplikasi ini. Sehingga pemotongan pajak nantinya hanya berasal dari *e-Commerce* saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan pengembangan aplikasi Bela Pengadaan, antara lain: Adanya perbedaan harga yang lebih tinggi pada aplikasi Bela Pengadaan; PPN yang dikenakan secara otomatis menimbulkan kesulitan untuk membeli beberapa jenis barang/jasa yang tidak dikenai PPN; Pemotongan pajak yang tidak langsung; Banyaknya aplikasi serupa untuk pengadaan langsung di bawah 50 juta; Belum mengakomodir transaksi non-UP dan non-KKP;

Sulitnya penyedia lokal untuk melakukan pendaftaran calon penyedia, dsb. Diharapkan melalui tulisan ini, pengembangan Bela Pengadaan dapat menjadi alternatif aplikasi pengadaan langsung yang tepat dan terintegrasi mulai dari penganggaran dan pembayaran, sampai dengan pelaporan kinerja penganggaran/penyedia sehingga satuan kerja selaku pengguna jasa dapat melakukan transaksi melalui satu wadah yang *user friendly*, mudah, tepat, dan cepat sesuai harapan pengguna. Dan tentu saja, sesuai slogan Bela Pengadaan yaitu Kita Bela, Kita Beli, mari kita dukung usaha pemerintah untuk memberikan langkah besar dalam membela dan mendukung UMKM Indonesia menjadi semakin maju! Bravo UMKM!

Teks: Veranita Sinaga

Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMN

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menyelenggarakan webinar “Peran Pelelangan Barang Milik Negara Dalam Penguatan Fungsi Manajer Aset Pada Penggunaan Barang” serta Launching Aplikasi Pengelolaan Aset Terintegrasi (PASTI) yang dilaksanakan pada Kamis (26/08) secara daring melalui zoom dan Live melalui kanal Youtube Sekretariat Jenderal (Setjen).

“Webinar ini kami selenggarakan dengan tujuan pertama adalah memberikan pemahaman proses pelelangan BMN dan apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan baik terkait dengan pelelangan BMN. Yang kedua tujuannya adalah diskusi ini diharapkan nanti mampu untuk menggali potensi-potensi baru dalam pengelolaan BMN, tidak hanya terpaku pada proses pemindahtanganan BMN saja, namun juga proses-proses lainnya seperti penggunaan BMN dalam koridor pelelangan BMN,” ujar Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Edy Gunawan dalam opening speech.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi yang mengapresiasi inovasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan BMN. “Tentunya saya menyambut baik dan mengapresiasi atas semua ide ataupun gagasan, sehingga kita bisa membuat semuanya menjadi lebih baik khususnya kali ini terkait dengan BMN,” ujar Sesjen Kemenkeu saat memberikan keynote speech. Edy juga menjelaskan bahwa narasumber acara mewakili dari berbagai

perspektif, baik dari segi kebijakan, teknis, dan pengguna itu sendiri. Adapun narasumber acara yaitu dari Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Mohamad Akyas, Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II Muchamad Angga Firmansyah, Operasional PT Balai Lelang Rajawali Karya Burhanudin, serta perwakilan pembeli lelang BMN Dwi Heru Winadi.

Sesjen Heru Pambudi menghimbau adanya peningkatan pemikiran dan perspektif seputar lelang di Indonesia supaya lebih maju (lebih advanced) dengan inovasi, pemikiran, metode, dan cara baru yang bertujuan untuk mempermudah semua pihak, serta supaya pajak lebih mudah dan transparan. Heru juga menyebutkan peran lelang di Kemenkeu dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan lelang BMN telah mampu meningkatkan penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Muchamad Angga Firmansyah yang dilanjutkan oleh Burhanudin menjelaskan tentang proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta II dan balai lelang swasta yang bekerjasama untuk melakukan lelang BMN. Burhanudin juga memberikan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan lelang dari sisi pelaksana lelang dari pihak swasta. Dalam acara yang sama, Sesjen juga meresmikan aplikasi Pasti (Pemantauan Aset Terintegrasi) yang merupakan submodul dari super apps yang sedang



dikembangkan oleh Biro Madaan bersama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) yaitu e-Prime Asset. Aplikasi PASTI yang merupakan terobosan terbaru Biromadan dalam upaya digitlaisasi peningkatan kualitas pengelolaan aset Kementerian Keuangan. Selain itu, Heru Pambudi juga mengumumkan kepada para peserta bahwa BMN Awards kembali digelar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkeu.

Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para peserta serta bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ditempat masing-masing.

Teks: Ayu Damelia Putri

Risiko Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang dilanda terjadinya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 disingkat Covid-19 di dunia. Wabah Covid-19 menyebabkan gangguan sosioekonomi global. Permasalahan besar terkait dampak dari wabah ini sangat berkaitan dengan dunia Kesehatan seperti kurangnya alat Kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menjadi kebutuhan yang bersifat mendadak untuk segera dipenuhi. Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa produk ataupun distribusi barang terkait penanganan Covid-19 ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi yaitu pemerintah dan penyedia barang

dan jasa. Situasi ini disebut sebagai kondisi darurat. Dari sisi penyedia dapat ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurangnya tenaga kerja, kelangkaan bahan produksi atau distribusi logistik yang terhambat serta harga yang fluktuatif dan cenderung sangat mahal. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penanganan wabah Covid-19 ini dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. Kebijakan tersebut salah satunya untuk mengatasi beberapa resiko yang muncul akibat terjadinya pandemi ini. Resiko yang terjadi antara lain, resiko strategis, operasional dan moral hazards. Selain itu, Pemerintah

melalui LKPP telah mengeluarkan peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta mengenai pengadaan dalam keadaan darurat diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Bab VIII Pengadaan Khusus. Peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam regulasi penanganan darurat pengadaan barang dan jasa saat ini. Bentuk perwujudan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang memberikan nilai manfaat serta mengedepankan prinsip yang efektif dan efisien tentu saja tidak lepas dari berbagai resiko. Berbagai resiko akan dihadapi dalam proses bisnisnya yang tentu saja mengakibatkan dampak

yang tidak baik bagi proses bisnis kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh adalah gagal tender, terdapat sanggahan dan pengaduan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa, keterlambatan pekerjaan saat pelaksanaan kontrak, pengenaan denda keterlambatan, risiko keselamatan kerja, terjadinya *force majeure* (bencana alam) dan lain sebagainya.

Pengelola pengadaan barang dan jasa menjadi subjek yang paling bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan risiko yang baik sehingga dapat mengurangi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang mengedepankan prinsip "*Value for Money*" yaitu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

A. RISIKO

Pengertian Risiko berdasar ISO 31000 adalah dampak/akibat dari ketidakpastian pada sasaran. Risiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah dampak/akibat dari ketidakpastian terhadap sasaran dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Risiko terdiri dari 3 unsur utama yaitu Peristiwa, kemungkinan terjadi dan Dampak. Risiko merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Untuk mengatasi risiko diperlukan adanya pengelolaan risiko.

Pengelolaan risiko berdasarkan ISO 31000 adalah Serangkaian kegiatan dan metode secara terkoordinasi yang digunakan untuk mengarahkan organisasi dan mengendalikan banyak risiko yang dapat berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak masalah yang timbul dari risiko. Pengelolaan risiko pengadaan barang dan jasa adalah aktifitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka menangani risiko pengadaan barang/jasa. Pengelolaan risiko dalam pengadaan barang dan jasa diperlukan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.

Prinsip Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1. Terintegrasi pada tiap tahapan PBJ sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku PBJ
2. Tersusun secara sistematis dan komprehensif
3. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan
4. Inklusif
5. Dinamis
6. Informasi terbaik tersedia
7. Faktor perilaku manusia dan budaya
8. Perbaikan berkelanjutan
9. Mencapai prinsip PBJ.

Beberapa area yang berisiko dalam pengadaan barang dan jasa di masa pandemic Covid-19 yaitu:

Tahap Perencanaan

- Identifikasi kebutuhan barang dan jasa tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan

- RAB tidak sesuai dengan ketentuan

Tahap Pemilihan

- Kualifikasi penyedia tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam regulasi.

Tahap Kontrak

- Terkait dengan penyelesaian kontrak dengan bukti pembayaran yang tidak lengkap
- Pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu distribusi barang yang tidak sesuai dengan jadwal atau target tempat yang tertera pada KAK

Pengelolaan risiko pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui beberapa tahap:

A. Identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menemukan, mengenali dan mendeskripsikan risiko yang berpotensi menghalangi pencapaian tujuan pengadaan, pekerjaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sumber risiko, peristiwa yang mungkin terjadi serta dampak dari terjadinya suatu peristiwa. Pada masa pandemi covid-19 ini, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Alokasi Anggaran tidak memadai
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak realistis
3. SDM dan fasilitas pendukung tidak mencukupi

B. Analisis risiko

Kegiatan menentukan kemungkinan dan dampak setiap risiko. Tujuannya

adalah menyesuaikan analisis risiko berdasarkan pengadaan tertentu.

Contoh:

1. PPK melakukan analisis terhadap proyek yang kemungkinan terlambat waktu penyelesaian pekerjaannya, misalnya, Ketika penundanaan pekerjaan selama 7 hari maka kerugian atau denda yang dibayar berapa besar.
2. PPK melakukan analisis terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan misalnya cuaca yang tidak dapat diprediksi (curah hujan), biaya bahan konstruksi, tukang atau pekerja yang mogok kerja dan lainnya.

C. Evaluasi risiko

Kegiatan mengevaluasi nilai risiko dan memprioritaskan risiko untuk ditindaklanjuti. Tujuannya melihat dan memahami keseluruhan risiko dan peringkatnya.

Contoh:

1. PPK bertanggung jawab menginformasikan kepada pimpinan terkait pelaksanaan proyek pengadaan yang sedang dilaksanakan.
2. Melakukan evaluasi terhadap perubahan kontrak, perubahan atau penyesuaian jadwal pekerjaan, penambahan SDM dalam menjalankan suatu proyek pengadaan.

D. Penanganan risiko

Kegiatan mengatasi risiko dengan membuat rencana untuk menangani atau memodifikasi risiko untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diimplementasikan. Tujuannya untuk Menyusun rencana penanganan yang dapat mengurangi paparan risiko secara keseluruhan bagi organisasi.

Dilakukan dengan cara menghindari, memitigasi, mengalihkan dan menerima risiko.

Contoh:

1. Penawaran gagal memenuhi persyaratan, maka kemungkinan penanganan adalah dengan merevisi KAK, Spesifikasi teknis, yang tercantum dalam dokumen pengadaan berdasarkan hasil riset pasar, Analisa dari sumber diperolehnya harga, kemudian penyusunan dokumen pengadaan ulang.
2. Kegagalan PPK atau Penyedia memenuhi kontrak, maka kemungkinan penanganan adalah memastikan administrasi kontrak berjalan dengan baik, melakukan monitoring dengan cara melaksanakan pertemuan atau rapat secara berkala, memeriksa laporan secara detail, dan terdokumentasi dengan baik.

E. Risiko kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19

1. Risiko strategis, merupakan risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi
2. Risiko kepatuhan, merupakan risiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis
3. Risiko moral hazards dan kecurangan
Moral hazard adalah situasi di mana seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur atau kehati-hatian. Situasi risiko moral hazard ini menggambarkan di mana asimetri informasi meningkatkan insentif dari satu pihak untuk mengambil risiko yang tidak semestinya.
4. Risiko operasional.
Risiko operasional lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Area yang berisiko dalam pengadaan barang dan jasa di masa pandemic Covid-19 yaitu perencanaan, pemilihan dan kontrak;
2. Pengelolaan risiko pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui tahap identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan penanganan risiko;
3. Risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko moral hazards dan kecurangan serta adanya risiko operasional harus dapat dimitigasi dengan pengendalian internal yang baik, juga dengan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal.
4. Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak umum yaitu dalam kondisi darurat mengatasi pandemic Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, diperlukan kecepatan dan keputusan yang tepat agar tetap tercapai efektifitas dan akuntabilitas;
5. Pemerintah Perlu menjaga akuntabilitas dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pandemi COVID-19, karena kondisi pelaksanaan yang terjadi tidaklah seideal dengan norma pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Teks: Yelly Metasari

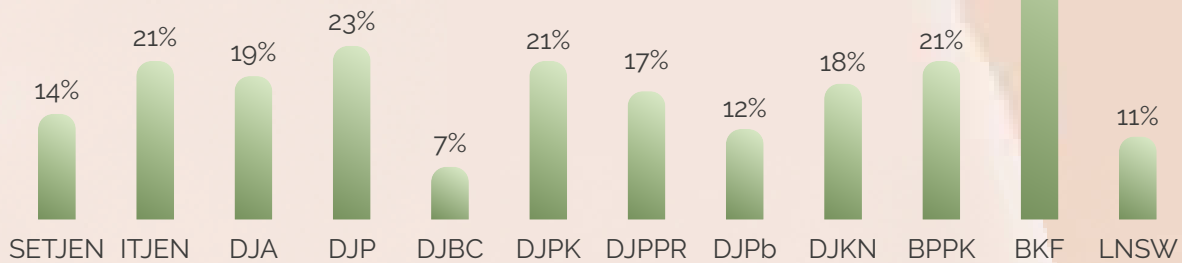
PENGHEMATAN ANGGARAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Penghematan = Pagu Anggaran - Nilai Kontrak

$$\text{Persentase Penghematan} = \left(\frac{\text{Nilai Penghematan}}{\text{Pagu Anggaran}} \right) \times 100 \%$$

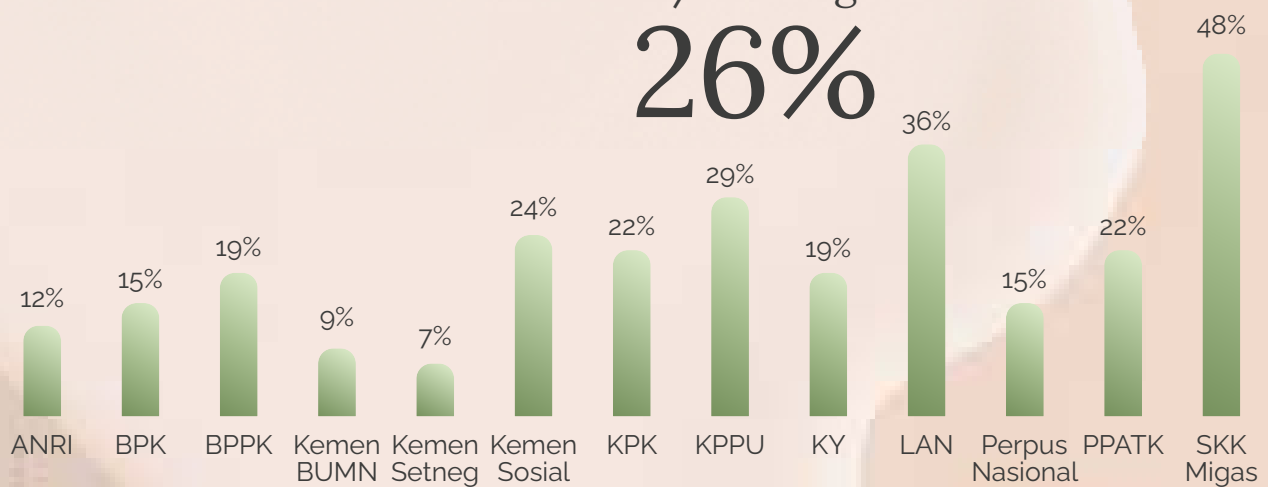
Penghematan yang dihitung adalah penghematan dari paket lelang yang selesai dilaksanakan.

Total Penghematan
Kementerian Keuangan
13%



Penghematan e-procurement Kementerian / Lembaga yang bekerja sama.

Total Penghematan
Kementerian/Lembaga
26%





PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG KREDIBEL DAN AKUNTABEL

- > Laporan Barang Pengguna: Laporan Semester I Tahun 2021 disampaikan pada tanggal 28 Juli 2021.
- > Optimalisasi Aset:
 - a. Rekomendasi optimalisasi aset terindikasi *idle* ditindaklanjuti 61 (97%) dari target 63 rekomendasi.
 - b. Dibentuk Tim Asesmen Penataan Ruang Kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kantor dan penataan ruang kerja Kantor Pusat di Lingkungan Kemenkeu.
- > *Satellite Office*: Penyelesaian *Satellite Office* di Kanwil DJBC Banten dan PKN STAN.
- > *Coworking Space*: Penyelesaian *Coworking Space* di GKN Denpasar dan GKN Palembang.

PENYEDIAAN DATA BMN DAN PENGADAAN KEMENKEU YANG AKURAT, AKUNTABEL, DAN BERDAYA GUNA

- > Validasi data BMN: realisasi kelengkapan data BMN pada Master Aset adalah sebesar 105% yaitu 1.680 NUP dari 1.600 NUP yang ditargetkan.
- > Tindak lanjut hasil sensus:
 - a. BMN tidak ditemukan yang sudah diterbitkan SK Penghapusan sebanyak 125.896 NUP atau 100% dari 125.896 NUP
 - b. BMN salah catat/duplikasi sebanyak 1.164 NUP atau 70% dari 1662 NUP
- > Pengawasan dan Pengendalian BMN: data BMN tidak wajar sebanyak 107 NUP dari 190 NUP, salah kodifikasi sebanyak 944 NUP dari target 5.899 NUP.
- > Pelaksanaan Tender melalui UKPB: 598 paket, realisasi Rp3,29 triliun dengan pagu Rp3,80 triliun sehingga penghematan sebesar Rp510 miliar (13,42%).
- > Program *IS Data Analytics*: telah diselesaikan dokumen mockup, dokumen ETL, dokumen SRS, dan dokumen Pengembangan Tahap I.
- > Kepatuhan Pengisian RUP: telah diisi Rp7,36 triliun (64,20%) dari total belanja pengadaan Rp11,47 triliun.

PENGUATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- > Kualitas Pengelolaan BMN:
 - a. Utilisasi dan optimalisasi: SK Sewa BMN (772), Penggunaan BMN (603), PSP BMN (752), PSG Rumah Negara (6.469), Pengajuan HDNo (4.532), dan PNBP dari sewa BMN Rp14.711.328.082.
 - b. Pemindahtanganan dan penghapusan: Pemindahtanganan (70.407 Unit BMN), penghapusan (70.620 unit BMN), Realisasi PNBP dari pemindahtanganan BMN (Rp52.445.617.778), Penyelesaian proses penghapusan sebanyak 470 SK Penghapusan.
- > BMN Awards 2021:
 - a. Telah dilakukan proses penilaian sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.
 - b. Telah diterbitkan KMK nomor 383/KMK.01/2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada Puncak Peringatan HORI ke-75.
- > Simplifikasi Peraturan:
 - a. Telah diterbitkan KMK nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mensimplifikasi 8 KMK tentang pengelolaan BMN yang sudah ada sebelumnya.
 - b. RPKM Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengganti dan mensimplifikasi 3 PMK dan 2 KMK yang sudah ada sebelumnya (Proses Pembahasan dengan Biro Hukum).

ORGANISASI DAN SDM YANG BERKUALITAS

- > Pengembangan SDM TW III: Webinar Peran Pelelangan BMN dan Penguatan Fungsi Manajer Aset pada Pengguna Barang, FGD Peran Modul Komitmen dan Modul Bendahara pada Aplikasi SAKTI terhadap Pengelolaan BMN, dan *Inhouse Training* pada acara NGOPI dengan tema "Metodologi Penelitian".
- > Pembangunan ZIWBK:
 - a. Internalisasi ZI-WBK WBBM.
 - b. *Workshop* persiapan penilaian nasional ZI-WBK WBBM Tahun 2021.
 - c. Pembuatan video profil Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.
 - d. Pelaksanaan input data responden.
- > Pengembangan Jabatan Fungsional:
 - a. JF PPBJ ditetapkan dengan formasi 92 orang dipenuhi sebanyak 55 orang.
 - b. JF Pranata Komputer dengan formasi 30 orang dipenuhi 11 orang.
 - c. JF Penata Laksana Barang (JFPLB), JF Analis Penggunaan Barang (JFAPB), dan JF Penilai Pemerintah (JFPP) sedang dalam proses pembentukan.

PENGELOLAAN MANAJEMEN

Barang Milik Negara dan Pengadaan

PENUGASAN PIMPINAN

- > Rumah Susun Negara:
 - a. MoU antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR telah ditandatangani dengan nomor PRJ-11/MK.01/2020 tanggal 12 November 2020 .
 - b. PKS antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR telah ditandatangani dengan nomor PRJ-117/SJ/2021 pada tanggal 20 Agustus 2021.
 - c. Penyiapan lahan di Jayapura (5000m²), Merauke (5040m²), Mimika (6460m²), dan Makassar (4000m²).
- > KTT-G20:
 - a. Telah melakukan rapat penyusunan dan finalisasi penyusunan DPP untuk Pengadaan pada rangkaian KTT-G20.
 - b. Telah dilakukan survei hotel dalam rangka pelaksanaan rangkaian KTT-G20.
- > Pembangunan gedung IdFC : Tindak lanjut arahan Wakil Menteri Keuangan terkait optimalisasi kantor Kemenkeu sejalan dengan NWOW sambil menunggu kepastian pembangunan gedung IdFC, dengan membentuk Tim Asesmen Penataan Ruang Kerja.
- > Pengembangan Data Center pada Eks Puskurbuk :
 - a. Gedung Pusmenjar sedang dalam proses pembangunan DC Kementerian Keuangan
 - b. Gedung Puskurbuk akan dialokasikan untuk Pusintek dan beberapa satuan kerja di lingkungan Kemenkeu yang belum mempunyai gedung kantor sendiri.
- > PSIAP (Coretax) TW III: Telah dilakukan pendampingan penyusunan KAK untuk tender *hardware production* PSIAP dengan DJP, Pusintek dan Itjen.
- > Pengadaan Meterai: Telah dilaksanakan harmonisasi RPMK peraturan pelaksanaan PP 86/2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.
- > Konsolidasi pengadaan IT *end-user*: Telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan penyedia e-Catalogue pada tanggal 14 September 2021.

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- > RKBMN: Telah dilaksanakan sosialisasi dan asistensi penyusunan RKBMN dan RKBMN-PPK Tahun 2023.
- > Penanganan Keluhan: Sebanyak 12.574 yang terdiri dari Telepon (893), email (5.116), Datang Langsung (38), Chatting (6.527)
- > Pemberian akses sistem: KPA (407), PPK (365), Pejabat Pengadaan (171), Pokja UKPBJ (9), Auditor (69), Penyedia (140 dari 197 permintaan)
- > Pelatihan Aplikasi: Jumlah peserta pelatihan SPSE untuk satker dan penyedia: 124 peserta dan pelatihan penggunaan aplikasi SIMPeL untuk satker: 558 peserta.
- > Implementasi Aplikasi:
 - a. 376 Satuan Kerja yang telah menggunakan aplikasi SIMPel dari 400 yang ditargetkan.
 - b. 376 Satuan Kerja yang telah menggunakan aplikasi SI-UKPBJ dari 700 yang ditargetkan.
- > Peran serta UMKM: sebesar Rp347.956.436.653 (11%) dari total paket pengadaan tender sebesar Rp3.293.085.950.956. Sisanya Rp2.945.129.514.303 dilaksanakan oleh Non Usaha Kecil.
- > Komponen TKDN: Rp2.098.993.640.055 (64%) dari total paket Rp3.293.085.950.956. Sisanya Rp1.194.092.310.901 (36%) bukan TKDN.
- > Asistensi PBJ: Menambah jumlah objek asistensi menjadi 193 objek asistensi berkenaan dengan bertambahnya jumlah Fungsional PBJ, termasuk 110 satker yang memiliki belanja modal prioritas.
- > Kinerja Pengadaan (terhadap paket konstruksi dengan nilai diatas Rp500jt-, dengan objek sebanyak 146 paket):
 - a) 71% paket dilaksanakan tepat waktu, b) efisiensi anggaran sebanyak 21%, c) rata-rata 24 penawaran per paket, dan d) 47% penawaran yang dievaluasi sudah memenuhi syarat.

SISTEM INFORMASI YANG ANDAL

- > e-Prime Aset:
 - a. telah dilakukan *user acceptance test* (UAT) dan *vulnerability test* (VT) pengembangan aplikasi.
 - b. seluruh modul aplikasi e-Prime Aset telah di-*hosting*.
- > SI-UKPBJ (Modul VMS dan Monev PBJ): Telah dilakukan pembahasan rancangan pengembangan sistem dengan konsultan dan *front-end* aplikasi.
- > e-Sewa: Telah dilakukan pembahasan rancangan pengembangan sistem dengan konsultan dan *front-end* aplikasi.
- > Aplikasi Pasti (Pemantauan Aset Terintegrasi): telah dilakukan *launching* Aplikasi PASTI untuk monitoring data BMN Strategis.

7 Aplikasi Untuk Merancang Desain UI/UX

UI (User Interface) dan UX (User Experience) merupakan dua bidang yang berbeda dalam dunia desain namun saling berkaitan. UI fokus pada desain tampilan sebuah produk yang terukur secara konkrit, sedangkan UX adalah hal yang lebih abstrak karena mengutamakan desain yang memberikan kenyamanan bagi pengguna. Mendesain sebuah UI/UX adalah proses yang cukup panjang, mulai dari menggali kebutuhan pengguna, membuat prototype hingga user testing. Untuk memudahkan dalam mendesain sebuah UI/UX kita dapat menggunakan beberapa aplikasi berikut:

1. Whimsical

Dalam Whimsical kita bisa membuat flowcharts, wireframes, maupun mind maps untuk membantu kita dalam merancang sebuah desain UI/UX. Whimsical sendiri memiliki tampilan yang bersih dan simpel sehingga memudahkan user untuk merancang UI khususnya pada tahap perancangan sketching dan membuat user

flow. Whimsical juga memiliki fitur untuk melakukan kolaborasi secara real-time dengan user lain.

2. Balsamiq

Balsamiq adalah sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk membuat wireframe aplikasi atau website. Ketika menggunakan Balsamiq, kita bisa merasakan kemiripan dengan membuat sketsa di kertas. Tampilan Balsamiq tergolong sederhana agar user bisa fokus terhadap konten dan struktur utama tanpa harus memikirkan detail.

3. Figma

Figma adalah salah satu aplikasi yang paling populer untuk merancang UI/UX untuk level pemula maupun level mahir. Figma dapat digunakan untuk membuat sketsa, membuat wireframe, maupun prototype. Fitur prototype Figma memiliki banyak interaksi yang cukup lengkap. Dengan Figma, kita bisa melakukan test kepada user dan melakukan observasi secara real time. Figma juga memungkinkan designer melakukan kolaborasi secara real-time. Figma juga bisa digunakan tanpa harus

membayar.

4. Adobe XD

Adobe Experience Design atau Adobe XD adalah sebuah aplikasi untuk merancang UI/UX berbasis vector untuk aplikasi web maupun aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Adobe. Adobe XD dapat digunakan di macOS dan juga Windows. Adobe XD cocok digunakan bagi pengguna yang sudah familiar dengan aplikasi Adobe. Dalam Adobe XD user juga bisa membuka dokumen dari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Adobe After Effects. Terdapat beberapa fitur yang ada di dalam Adobe XD seperti prototype, animasi, dan juga responsive resize.

5. Sketch

Sketch merupakan salah satu aplikasi untuk merancang UI paling "senior" dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Sketch memiliki fitur yang memudahkan pengguna untuk melakukan proses desain, kolaborasi, prototype hingga proses handover kepada developer. Awalnya Sketch hanya bisa digunakan oleh pengguna

Mac, namun sekarang bisa diakses juga melalui web browser.

6. Zeplin

Setelah proses desain antarmuka, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah handover desain kepada developer. Untuk memudahkan proses handover, kita dapat menggunakan aplikasi Zeplin. Zeplin adalah aplikasi yang dapat membantu developer untuk mengimplementasikan desain dalam bentuk coding dengan proses yang lebih mudah dan praktis. Dengan Zeplin, developer tidak perlu secara manual menghitung ukuran layout, sizing atau menentukan kode warna dalam desain.

Aplikasi-aplikasi tersebut mudah untuk dioperasikan dan tentunya sangat membantu dalam pembuatan sebuah aplikasi untuk web, mobile, maupun desktop. UI/UX akan terus berubah dan berkembang mengikuti tren dan aplikasi juga pasti mengikuti perkembangan dan perubahan tersebut. Banyak aplikasi lain yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah UI/UX dan aplikasi-aplikasi di atas tersebut bukanlah aplikasi utama

yang harus selalu kita pakai ketika membuat UI/UX karena harus menyesuaikan preferensi dan anggaran yang kita punya. Namun, aplikasi tersebut di atas menurut saya memiliki fitur yang sudah sangat lengkap dan cukup untuk proses pembuatan UI/UX terutama Figma karena menurut saya fitur dari Figma cukup lengkap dan menyediakan versi yang gratis.

Teks: Winny Irmarooke

Laptop Usang Jangan Dulu Dibuang

Penerapan Flexible Working Space (FWS) sebagai New Normal di Kementerian Keuangan menjadi pendongkrak cara kerja baru dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja selama periode tertentu. Terobosan ini dibuat agar pegawai Kementerian Keuangan bekerja tidak hanya berdasarkan produktivitas dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi, tetapi bagaimana pegawai dapat mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya fleksibilitas lokasi kerja ini, memungkinkan pegawai untuk bekerja secara remote menggunakan laptop. Karakter laptop yang bersifat praktis dan ringkas tentu menjadi pilihan utama saat bekerja bila dibandingkan dengan penggunaan Personal Computer (PC) yang ukurannya jauh lebih besar. Tentunya laptop sendiri memiliki jangka waktu penggunaan, karena semakin lama umur laptop, maka efektivitas perangkat didalamnya pun semakin berkurang. Apabila kita memiliki laptop lama dengan performa yang 'lemot', tak perlu khawatir, ternyata laptop lama pun masih dapat kita tingkatkan performanya. Berikut merupakan cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kinerja laptop lama.

HARDWARE

Menambah Kapasitas RAM (Random Access Memory)

Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak, sehingga penyimpanan RAM bersifat tidak permanen. RAM akan bekerja maksimal tergantung pada kapasitas dan kecepatan akses datanya. Semakin besar RAM yang dipasang, semakin cepat komputer bekerja. Sebelum menambahkan RAM ada baiknya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah laptop memiliki slot RAM tambahan atau tidak. Caranya adalah dengan membuka bagian bawah laptop. Jika tidak terdapat slot tambahan, maka kita perlu menggantinya dengan kapasitas yang lebih besar, bukan dengan menambah RAM. Terdapat beberapa jenis RAM untuk laptop antara lain :

1. DDR RAM (333 MHz dan 400 MHz)
2. DDR2 RAM (400 MHz – 800 MHz)
3. DDR3 RAM (1066 MHz – 3200 MHz)
4. DDR4 RAM (2133 MHz – 3200 MHz)

Tiap jenis RAM memiliki frekuensi pembacaan data yang berbeda, semakin tinggi angka frekuensi maka akan semakin cepat pula. Penentuan jenis RAM ini tentu berdasarkan kesesuaian antar komponen hardware lainnya pada laptop. Untuk mengetahui detail RAM pada laptop, kita dapat menggu-

nakan tools CPU-Z yang dapat didownload gratis pada situs www.cpuid.com.

Mengganti HDD lama dengan SSD Hard Disk Drive (HDD) dan Solid State Drives (SSD) merupakan perangkat keras (hardware) yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada sebuah laptop, maupun komputer. Walaupun memiliki fungsi yang sama, tetapi cara kerja keduanya memiliki perbedaan. Sistem Kerja pada hard disk terdiri dari sistem mekanik dan elektrik. Piringan yang menjadi bagian mekanik hard disk akan diputar oleh motor dan ujung lengan menggunakan komponen elektronik guna memudahkan aktivitas menulis maupun membaca suatu data sehingga menimbulkan suara berisik, sedangkan SSD menggunakan sistem elektrik saja, sehingga pada saat pengolahan data tidak ada satu bagian pun yang bergerak selama proses menulis maupun membaca data, cara kerja seperti ini layaknya proses pembacaan data dari flashdisk maupun RAM. Untuk penyimpanan data pada HDD menggunakan metode fragmentasi, yaitu pemencaran data. Data yang awalnya tersusun secara rapi dan beraturan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan inilah yang menyebabkan kinerja hardisk menjadi lambat secara perlahan. Untuk memulihkan kinerja HDD

yang melambat, maka perlu dilakukan defragmentasi, hal ini berbeda dengan SSD yang tidak akan mengalami fragmentasi karena penyimpanannya sudah menggunakan chip flash. Berbicara tentang kecepatan kerja, SSD lebih bisa diunggulkan karena semuanya mengandalkan sistem elektrik. Tingkat kecepatan SSD 8 kali lebih cepat dibandingkan HDD. Tak heran kalau kebanyakan pengguna komputer atau laptop saat ini beralih ke SSD. Mengingat teknologi yang disematkan pada SSD lebih baik ketimbang HDD, sangat wajar apabila harga SSD lebih mahal, tentunya hal ini kembali lagi kepada kebutuhan pengguna.

SOFTWARE

Pilih Aplikasi yang Tidak Digunakan
Ketersediaan memori pada laptop lama perlu kita antisipasi, salah satunya dengan memilah aplikasi sesuai kebutuhan saat ini. Hapuslah aplikasi yang jarang digunakan juga aplikasi yang memiliki fungsi sama. Aplikasi yang kita instal biasanya akan secara otomatis tersimpan di drive C, jika drive tersebut penuh akan mengurangi performa laptop. Lakukan Defragment dan Cleanup System Files
Defragment adalah proses menata ulang blok file di dalam HDD agar bisa rapi Kembali. Tiap kali kita menginstal aplikasi atau menyimpan file, maka

data tersebut akan tersimpan dalam bentuk blok. Semakin lama blok ini akan semakin berpencar karena blok yang sebelumnya tidak digunakan akan tertimpa. Defragment data dilakukan dengan cara mengakses control panel -> administrative tools -> defragment and optimize drives.

Kadang banyak sekali system file pada laptop lama yang sudah menggunakan menjadi sampah (seperti sistem file Windows Lama yang berukuran besar). Untuk mengurangi beban ruang penyimpanan, maka kamu bisa menghapus file sistem laptopmu dengan cara pergi ke C:\ drive -> Properties -> Disk Cleanup. Cara ini bisa dilakukan berulang.

RESET WINDOWS

Laptop yang sudah tua akan mempengaruhi kerja dari sistem operasi khususnya Windows. Hal tersebut menyebabkan Windows sering eror dan laptop menjadi lebih lemot. Kita dapat melakukan reset Windows pada laptop yang kita gunakan. Sebelum melakukan hal ini, kita harus mencadangkan (back up) terlebih dahulu seluruh file dan data yang ada di laptop.

REKOMENDASI DAN SARAN

Sebelum melakukan pergantian hardware pada laptop, sebaiknya lakukan

optimalisasi terhadap software sesuai tips diatas. Jika ternyata belum ada peningkatan kinerja laptop, pergantian pada hardware menjadi solusi selanjutnya.

Demikianlah cara untuk meningkatkan laptop lama agar dapat dipergunakan Kembali, jangan lupa untuk selalu membersihkan debu pada bagian dalam kipas laptop juga memperhatikan kinerja thermal paste yang berfungsi untuk mengurangi hawa panas penyebab overheat pada laptop.

Teks: Yudha Pratama

Database NoSQL

Di awal kelahiran database, pengolahan database dilakukan menggunakan bahasa Structure Query Language (SQL). Bahasa ini menjadi salah satu pondasi kelahiran dari database dan masih digunakan sampai sekarang. Akan tetapi perkembangan data juga menuntut untuk melakukan inovasi dalam teknologi, terlebih untuk mengatasi banyaknya data, banyaknya node, kebutuhan data center sebagai pusat data, dan masalah fail over, maka dibutuhkan suatu bentuk database lain yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

NoSQL merupakan singkatan dari Not Only SQL, yang artinya jenis database yang tidak menggunakan perintah SQL dalam melakukan manipulasi data, baik dalam melakukan penyimpanan maupun pengambilan data pada databasenya. Ini merupakan tipe database yang sangat jauh berbeda dengan konsep Relational Database Management System (RDBMS). Perbedaan utamanya adalah pada NoSQL tidak dikenal istilah relation dan tidak menggunakan konsep skema, kalau biasanya digunakan query "Join" untuk merelasikan antar tabel, pada NoSQL hal ini tidak dilakukan karena setiap tabel berdiri sendiri dan tidak tergantung pada tabel lain (independen). Selain itu pada konsep RDBMS sebelum proses insert data dilakukan, struktur tabel seperti tipe data dan ukurannya harus didefinisikan terlebih dahulu, sedangkan pada konsep NoSQL hal ini tidak perlu, karena data bisa langsung disimpan tanpa mendefinisikan tipe dan ukurannya lagi, sehingga menjadi lebih fleksibel jika terjadi perubahan.

Perbedaan NoSQL dengan SQL :

1. NoSQL tidak menggunakan skema relasional, pada SQL kita diharuskan untuk mendefinisikan table yang akan digunakan, sedangkan pada NoSQL hal ini tidak diperlukan.
2. NoSQL menggunakan dynamic schema yang dapat digunakan untuk menampung data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur secara efisien dalam skala besar, berbeda dengan SQL yang hanya dapat menampung data yang terstruktur.
3. NoSQL memiliki kemampuan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan SQL, untuk menambah jumlah server database di dalam NoSQL lebih mudah dilakukan sehingga tidak perlu terjadi downtime.
4. NoSQL memiliki kemampuan automatic sharding yang tidak dimiliki oleh SQL, yaitu kemampuan untuk menyebarkan data secara merata ke seluruh server database, meskipun telah dilakukan partisi pada data tersebut.
5. NoSQL memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi data lebih cepat dari SQL, hal ini dikarenakan NoSQL menggunakan Integrated Caching di dalam sistem memorinya.
6. Pada database SQL, meskipun berbeda-beda pembuatnya namun cara kerja maupun cara penggunaannya relatif sama, yaitu sama-sama menggunakan tabel yang dihubungkan oleh relasi-relasi dan manipulasi data dengan bahasa SQL. Sedangkan pada database NoSQL bisa sangat berbeda satu dengan yang lain, karena cara penyimpanannya berbe-

da, maka cara penambahan maupun pengambilan datanya juga berbeda.

NoSQL mempunyai 4 metode cara penyimpanan data, yaitu :

- Key-Value based (disimpan dalam bentuk kunci dan nilai yang berpasangan);
- Document based (disimpan dalam dokumen-dokumen);
- Column based (disimpan dalam kolom-kolom);
- Graph based (disimpan dalam bentuk graph yang beris node dan edge).

Kapan NoSQL tepat digunakan daripada database relasional :

1. Saat membutuhkan penyimpanan data yang relatif besar, namun terdapat keterbatasan resources. Relasional database sebenarnya scalable untuk data besar, bahkan untuk skala PetaByte (e.g. Facebook menggunakan MySQL), namun dibutuhkan resources yang sangat besar untuk membuat database relasional memiliki performa yang baik bila datanya besar.

2. Saat data tidak terstruktur, misalkan data yang masuk ke database terkadang hanya memiliki 4 kolom, tapi dilain waktu memiliki jumlah kolom yang berbeda lagi. Pada database relasional kejadian seperti ini akan memaksa untuk mengubah struktur DB (schema) yang biasanya sangat fatal, terutama apabila datanya besar. Perubahan schema adalah bencana besar bagi sistem IT, karena aplikasi juga harus direvisi mengikuti perubahan tersebut.

3. NoSQL sangat cocok dengan aplikasi yang berorientasi objek,

dengan tidak adanya Join di NoSQL dan query yang rumit, NoSQL dapat mempercepat developer dalam membangun sebuah aplikasi.

4. NoSQL sangat cocok bila aplikasi/system membutuhkan proses write/insert dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat, dikaitkan dengan terminology di Big Data, NoSQL sangat cocok pada sistem yang memiliki Velocity data yang besar.
5. NoSQL sangat cocok apabila data mengandung informasi lokasi (e.g. latitude/longitude).
6. Data complexity, penyimpanan data tersebar pada berbagai lokasi yang berbeda (distributed).

Kapan NoSQL tidak tepat digunakan :

1. Saat data yang diinput memiliki nilai yang sangat berharga (transaksi pembayaran/transfer). NoSQL cepat dalam melakukan input namun dalam hal transaksi suatu nilai, tidak seandal tipe database lain.
2. Analytic: walau memiliki implementasi map reduce sendiri, NoSQL bukan pengganti Hadoop atau analytic engine lainnya, NoSQL hanya bersifat melengkapi analytic engine.
3. NoSQL tidak mendukung input beberapa hal ke satu atau lebih "table" (Multi-Object Transactions). Misal, MongoDB hanya support untuk penyimpanan ke sebuah dokumen.
4. Jika aplikasi yang dibangun membutuhkan query yang kompleks dan rumit (complex query), maka biasanya NoSQL kurang cocok walaupun NoSQL memiliki query sendiri, namun lebih terbatas dibandingkan database konvensional.

Beberapa database NoSQL yang populer digunakan saat ini :

1. NoSQL dengan metode penyimpanan data Key Value Based
 - Redis

Redis merupakan database open source, redis merupakan singkatan dari REmote DIctionary Server. Database ini dikembangkan oleh Salvatore Sanfilippo pada tahun 2009 dan ditulis dalam bahasa C. Redis sangat populer karena kecepatan akses data maupun durabilitas (ketahanan) sebagai salah satu sistem database untuk penyimpanan, juga memiliki keunggulan dalam fitur in-memory dan networked. Redis menyimpan data utama pada memory (RAM) server yang dapat dikonfigurasi untuk ditransfer pada disk server, karena kecepatannya, Redis umumnya dipakai untuk cache data bagi aplikasi web. Selain itu Redis juga dipakai sebagai penunjang kinerja RDBMS untuk penyimpanan Key data tertentu. Redis juga sangat bagus digunakan sebagai media penyimpanan untuk Key-Value Store.
 - Riak

Riak merupakan database NoSQL terdistribusi yang menyimpan datanya dalam bentuk key-value. Riak memiliki arsitektur multi node tanpa master yang menyediakan pembacaan dan penulisan cepat bahkan jika terjadi kegagalan jaringan atau perangkat keras. Untuk memastikan ketersediaan data dan toleransi partisi, data direplikasi secara default ke tiga node dalam cluster, sehingga tidak terdapat master tunggal, dan node mana pun dapat melayani permintaan yang masuk. Dengan arsitektur tanpa master membuat riak mudah diatur dan dioperasikan, untuk menambahkan atau menghapus node dari sebuah cluster menjadi cukup mudah.

Riak dirilis pertama kali pada tahun 2009, ditulis dalam bahasa pemrograman Erlang dengan lisensi Apache License 2.0 oleh perusahaan Basho Technologies. Riak memiliki dua versi yakni Open source edition dan Enterprise edition.

2. NoSQL dengan metode penyimpanan data Document Based
 - MongoDB

MongoDB merupakan database yang paling populer diantara database NoSQL lainnya. Hal ini dikarenakan proses instalasi maupun penggunaan mongoDB yang cukup mudah. MongoDB merupakan database open source sehingga proses perkembangannya menjadi cukup pesat karena setiap orang dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkannya. MongoDB merupakan database NoSQL yang berbasis document, data-data disimpan dalam suatu dokumen JavaScript Object Notation (JSON) yang disebut BSON (Binary JSON). Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ sejak tahun 2009, mongoDB telah mendukung hampir semua bahasa pemrograman untuk dapat berinteraksi, tidak hanya sebatas bahasa pemrograman, beragam framework terkenal pun sudah dapat menggunakan mongoDB untuk menyimpan datanya,

- CouchDB

CouchDB merupakan database NoSQL yang dikembangkan oleh Apache pada tahun 2005. CouchDB berbasiskan document oriented dengan format penyimpanan data dalam bentuk JSON dan menggunakan Javascript untuk bahasa pengaksesan datanya. CouchDB juga merupakan database open source serta dikembangkan dalam bahasa

pemrograman Erlang yang mengandalkan pada reliabilitas dan konkurensi.

3. NoSQL dengan metode penyimpanan data Column Based

- Cassandra

Cassandra juga dikembangkan oleh Apache dan merupakan sebuah sistem penyimpanan data terdistribusi untuk menangani jumlah data yang sangat besar dan terstruktur. Cassandra adalah cluster tanpa master, sehingga tidak ada titik kegagalan tunggal yang terjadi, dan hash data akan terus direplikasi diseluruh cluster yang menyebabkan waktu aktif layanan 100% dapat dicapai. Cassandra merupakan aplikasi open source yang ditulis dalam bahasa Java, untuk memproses datanya Cassandra menggunakan bahasa sendiri yaitu Cassandra Query Language (CQL) yang tidak jauh berbeda dengan SQL meskipun terdapat beberapa tambahan yang lebih canggih, sehingga mudah dipelajari dengan cepat bagi yang telah terbiasa menggunakan SQL.

4. NoSQL dengan metode penyimpanan data Graph Based

- Neo4j

Neo4j merupakan database NoSQL berbasis graph yang paling dikenal. Neo4j menyimpan relasi antar objek dalam struktur seperti graph, dimana setiap objek merujuk ke objek lainnya

secara langsung yang direpresentasikan dalam bentuk node dan edge. Node merupakan titik, sedangkan edge adalah penghubung antar dua node, baik node dan edge memiliki atribut yang bisa disesuaikan. Dalam melakukan proses penambahan maupun pengambilan data, Neo4j memiliki bahasa sendiri yang disebut Cypher. Neo4j dikembangkan menggunakan bahasa Java dengan lisensi GPL V3 oleh Neo Technologies artinya Neo4j termasuk database open source.

- OrientDB

OrientDB merupakan open source database NoSQL dengan yang menggabungkan antara NoSQL jenis graph dan document. Database ini dikembangkan oleh Orient Technologies LTD dengan menggunakan bahasa java, dan dirilis pertama kali tahun 2010. OrientDB diklaim sangat cepat dan mampu menyimpan 220.000 record per detik diperangkat standar. OrientDB mendukung replikasi dengan metode master-to-master dimana seluruh instance database dapat diakses secara read+write, dan memiliki automatic sync ketika salah satu instance terputus lalu tersambung lagi. OrientDB menawarkan dua edisi yakni Community Edition yang tersedia secara gratis dan Enterprise Edition yang merupakan aplikasi komersial.

Sampai saat ini sudah ada lebih dari 150 varian aplikasi database yang menggunakan konsep NoSQL. Tetapi hal ini tidak menandakan bahwa penggunaan SQL akan digantikan oleh NoSQL, karena NoSQL dikembangkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada database dengan skema relasional dan keduanya saling melengkapi. Pilihan penggunaan database SQL maupun NoSQL disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penggunanya, karena baik database relasional (SQL) maupun non-relasional (NoSQL) memiliki kelebihan dan kekurangan. Perpaduan penggunaan NoSQL dan SQL yang tepat, dapat meningkatkan performa database dan juga dapat menghemat biaya pembelian infrastruktur.

Teks: Nuzfari Alkiron

Optimalkan Barang Rampasan KPK

Jakarta, 9 November 2021 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian Keuangan. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/KM.6/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penandatanganan BAST ini dilakukan oleh Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Heru Pambudi selaku Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta disaksikan oleh Karyoto selaku Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Edy Gunawan selaku Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.

Adapun Penetapan status penggunaan BMN yang berasal dari barang rampasan KPK kepada Kementerian Keuangan meliputi 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat, dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil Toyota Land Cruiser (Nopol L 81 SM);
- Mobil Toyota Nav (Nopol L 1796 WY); dan
- Mobil Toyota Alphard (Nopol L 1956 M).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyampaikan ucapan terima kasih kepada DJKN selaku Pengelola Barang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan status penggunaan BMN yang berasal dari barang rampasan KPK kepada Kementerian Keuangan. Kemudian Heru melanjutkan bahwa erjalannya penetapan status penggunaan BMN ini, dapat menjadi contoh kesuksesan koordinasi antara KPK dan Kementerian Keuangan dalam optimalisasi BMN agar dapat dioptimalkan penggunaannya melalui penetapan status penggunaan maupun bentuk penggunaan lainnya, dengan tujuan agar BMN yang kita miliki tidak hanya menjadi beban APBN, tetapi juga berdaya guna bagi Kementerian/Lembaga lain yang membutuhkan.

“Semoga sinergi kita sebagai abdi negara selalu erat dan memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan bangsa dalam rangka menuju Indonesia Maju.” Tutup Heru Pambudi.



Teks: Ayu Damelia Putri

Find My Device


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, seperti peralatan TIK dan internet mengalami perkembangan yang sangat cepat, semakin membawa kita ke arah digital dan mobile. Kita dapat bekerja dari kantor maupun dirumah atau bahkan ketika sedang dalam perjalanan. Untuk mengawasi perangkat mobile tersebut, biasanya Sistem Operasi (Operating System/OS) perangkat tersebut mempunyai fitur 'Find My Device' untuk menemukan perangkat yang hilang.

Bagaimana dengan Perangkat TIK seperti Personal Computer (PC), Notebook atau Laptop?. Perangkat tersebut merupakan aset yang digunakan oleh pegawai untuk membantu pekerjaan perkantoran. Kini pada sistem operasi (OS) Windows 10, microsoft sudah memberikan fitur 'find my device', sehingga kita dapat mengawasi PC, Notebook atau Laptop dari jarak jauh. Ada beberapa persyaratan agar fitur ini dapat bekerja, yaitu: 1) Login pada PC dengan menggunakan akun microsoft; 2)

Login pada PC sebagai administrator;
3) Mengaktifkan fitur 'Find My Device'.



Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur 'Find my device':

1. Klik Start  > Settings > Update & Security > Find my device

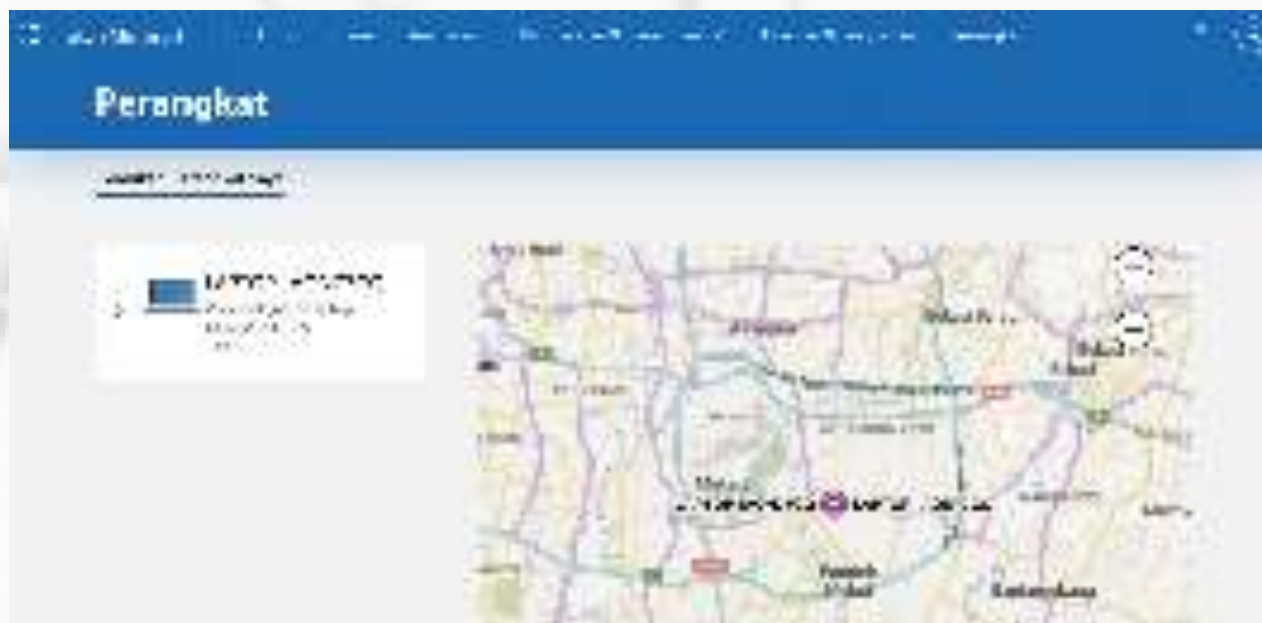


2. Jika Find my device : OFF, klik Change, kemudian ubah menjadi ON

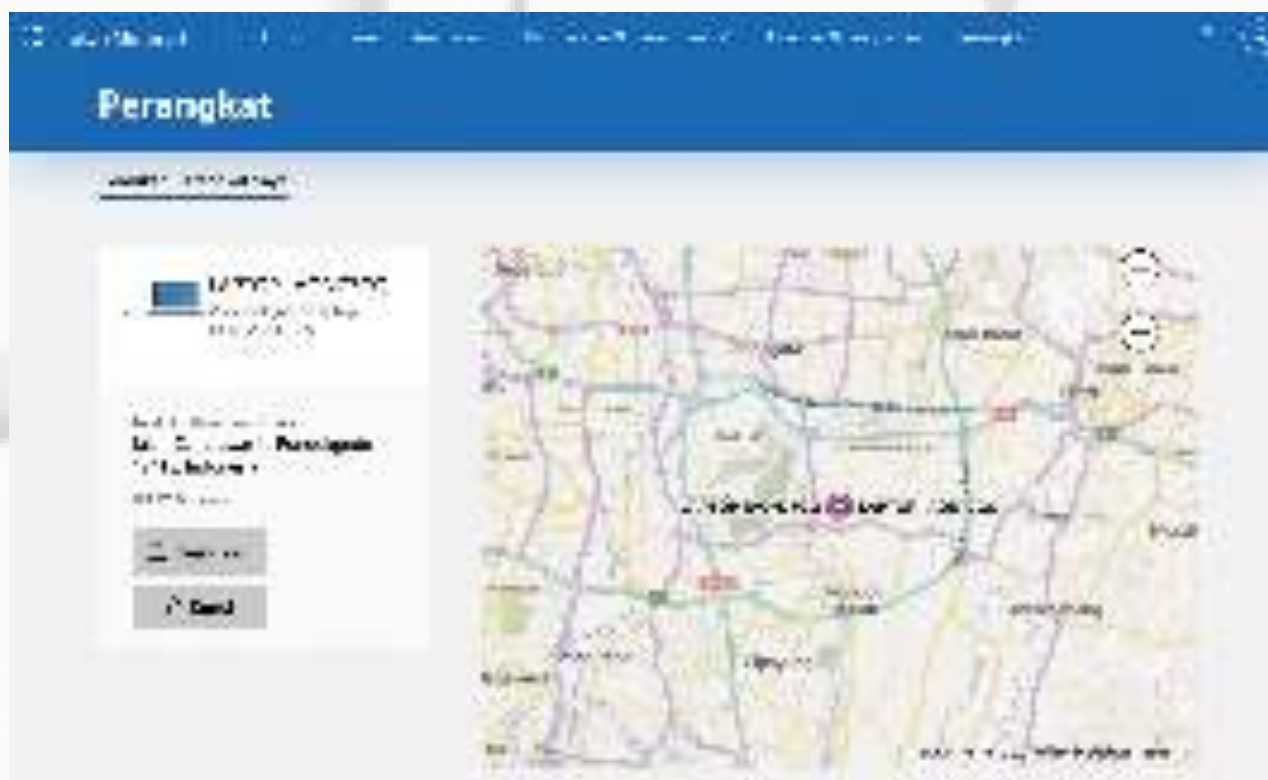


Selanjutnya untuk menemukan lokasi PC, notebook, laptop, ikuti langkah-langkah berikut:

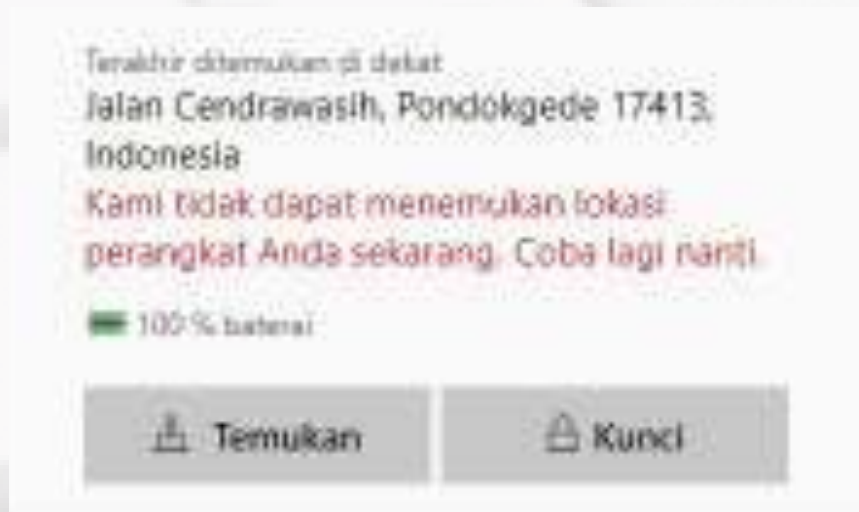
1. ketik laman berikut <https://account.microsoft.com/devices/find-my-device> pada browser. Kemudian login menggunakan akun Microsoft. Setelah login, maka akan muncul halaman berikut ini:



2. Klik perangkat yang akan dicari, kemudian klik tombol Temukan.



3. Apabila PC yang akan dicari dalam keadaan mati atau tidak terhubung dengan internet, maka akan muncul notifikasi seperti ini:



Dengan akun Microsoft, kita dapat mengelola perangkat mobile lainnya seperti perangkat iOS dan android. Untuk perangkat iOS, download terlebih dahulu Microsoft Edge dari Apple App Store dan sign in menggunakan Akun Microsoft. Untuk perangkat Android download Microsoft Edge, Microsoft Launcher, atay Your Phone Companion dari the Google Play Store dan sign in menggunakan Akun Microsoft. Sementara perangkat MacOS saat ini tidak dapat ditambahkan.

Premium Matcha Latte

Kita bisa membuat Premium Matcha Latte ala kafe sendiri di rumah, loh!

Buat kamu yang hobi nongkrong di kafe, pasti sudah tak asing lagi dengan minuman Matcha Latte. Matcha Latte terbuat dari bubuk matcha yang berasal dari daun teh hijau yang proses pengeringannya dengan cara pendinginan.

Yuk! Mari kita praktikkan resep Matcha Latte sendiri di rumah. Daripada mahal-mahal nongkrong di kafe, tentu lebih hemat membuat sendiri di rumah. Bahan dan cara membuatnya mudah kok, bisa kita temui dengan mudah!

bahan-bahan yang perlu disiapkan:

- 1.5 sdt Bubuk Matcha
- 250 ml Susu cair full cream
- 2 sdm Creamer bubuk
- 3 sdm Sirup Gula (optional)
- 4 sdm Air Panas
- Es Batu

alat-alat yang diperlukan:

- Sendok
- Panci
- Gelas/wadah kecil
- Gelas untuk sajian
- Whisk (Penggocok)

Cara membuat:

1. Pertama, siapkan gelas/wadah dan masukkan bubuk matcha, creamer bubuk, serta sirup gula ke dalamnya.
2. Kedua, tambahkan air panas sebanyak 4 sendok makan.
3. Kemudian, aduk semuanya hingga tercampur secara merata.

4. Sekarang, siapkan panci, isi dengan susu cair, letakkan di atas kompor, nyalakan api, dan rebus susu hingga beruap. Tidak perlu sampai susu mendidih.
5. Jika sudah, maka matikan api dan tuangkan susu ke dalam gelas kosong.
6. Kemudian, kocok susu menggunakan whisk (penggocok) hingga susu menjadi berbusa.
7. Selanjutnya, masukkan es batu secukupnya atau sesuai selera.
8. Terakhir, tuangkan matcha yang sudah diaduk sebelumnya, lalu aduk secara merata.
9. Akhirnya Premium Matcha Latte selesai dibuat dan siap untuk disantap.

Mudah kan membuat Premium Matcha Latte? Gak usah jauh-jauh ke kafe dan sering-sering nongkrong di kafe lagi nih kalau kita bisa membuat sendiri di rumah. Jadi lebih hemat juga pastinya!

Matcha Latte ini cocok buat kamu yang bosan dengan varian teh biasa atau coklat. Cocok juga buat kamu yang kurang cocok minum kopi. Siapapun bisa menikmati Premium Matcha Latte ini dengan mudah dan murah.



Teks: Beby Vizca

Foto: pexels.com

Hustle Culture

Sering kali kita merasa untuk dikatakan produktif, kita harus menjadi orang sibuk yang melakukan pekerjaan tanpa kenal waktu maupun kondisi diri kita sendiri setiap harinya. Ternyata, itu merupakan bentuk Hustle Culture, loh! Lalu, apa sih Hustle Culture itu? Berdampak bagi kehidupan kita tidak ya? Istilah Hustle Culture pertama kali ditemukan pada tahun 1971, dan semakin menyebar dengan cepat, terutama di kalangan anak muda. Fenomena ini membuat seseorang percaya bahwa aspek kehidupan paling penting adalah mencapai tujuan professional dengan bekerja keras tanpa henti (non-stop).

Di Indonesia, satu dari tiga pekerja mengalami gangguan kesehatan mental akibat jam kerja berlebih. Di masa pandemi ini, dengan maraknya seruan agar tetap produktif dari rumah kian menjamur dan memunculkan tren hustle culture baru yang perlu kita sikapi dengan baik. Hustle Culture merupakan merupakan standar yang tercipta dalam masyarakat di mana kita hanya bisa berhasil mencapai suatu tujuan hidup dengan cara mengorbankan diri kita pada kapasitas yang paling maksimal secara profesional setiap harinya, sehingga kita rela tidak tidur, tidak istirahat, atau bahkan melewatkan weekend hanya untuk belajar ataupun bekerja. Ciri-ciri orang yang terjebak ke dalam Hustle Culture, yakni:

1. Merasa Bersalah, ketika menggunakan waktu untuk refreshing atau bersantai;



2. Percaya kalau semakin banyak bekerja, maka semakin dekat dengan pencapaiannya;

3. Anti untuk tertinggal di posisi belakang;

4. Rela mengorbankan apapun demi pencapaian yang diinginkan.

Pasti di dalam benak kita muncul pertanyaan, mengapa orang-orang bisa terjerumus ke dalam Hustle Culture ini, sih? Tentu saja ada alasan tersendiri ataupun faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Pertama, kemajuan dan kemudahan teknologi yang membuat kita sulit berhenti bekerja karena sudah tidak berartinya ruang dan waktu. Kedua, konstruksi sosial seakan memaksa kita untuk mencapai sesuatu agar dianggap naik level. Terakhir, hadirnya Toxic Positivity di sekeliling seperti kalimat "Jangan banyak ngeluh, ayo kerja lagi!", "Masa gitu aja nyerah". Tentu saja, bekerja keras memang merupakan hal penting, namun ada batasan di mana hal tersebut bisa menjadi toxic dan mengancam kes-

ehatan fisik dan juga mental. Karena Hustle Culture mempunyai dampak negatif yang mungkin saja bisa terjadi misalnya tidur menjadi kurang, meningkatkan kecemasan dan depresi, Kesehatan fisik menurun, hubungan dengan orang lain memburuk, menyebabkan stress tinggi/burnout dan mood menjadi buruk, dan yang terakhir hilangnya work-life balance. Kalau kita sudah mempunyai tanda-tanda yang tersebut di atas, maka kita bisa menghindarinya dengan upaya sebagai berikut:

1. Kadang cuek dan 'masa bodo' perlu dilakukan untuk mengistirahatkan penat di kepala;
2. Jangan terlalu ambisius apabila sudah membuat kecemasan tersendiri bagi diri kita dan mengganggu jam tidur;
3. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena setiap orang punya cara dan jalan hidupnya masing-masing;
4. Lowongkan waktu untuk diri sendiri (me time)

Teks: Beby Vizca

Foto: pexels.com

Serah Terima Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI

Kamis (25/11), bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Tugas Penanganan Hak tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melakukan serah terima aset eks BLBI pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L). Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Sesuai dengan Keppres tersebut, Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan PMK 154/KN.06/2020 tentang Pengelolaan Aset eks BPPN, penanganan aset properti eks BLBI dapat dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pemda dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada K/L guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait. Hibah dan PSP atas aset properti eks BLBI dilakukan untuk memenuhi besarnya kebutuhan atas aset properti dari Pemda dan K/L.

Aset Eks BLBI yang diserahkan kepada tujuh K/L dalam acara serah terima Hibah dan Penetapan Status Penggunaan



(PSP) ini memiliki total luas 323.315 m² dan total nilai Rp146,5 miliar. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi mewakili Kemenkeu menandatangani BAST PSP BMN sebagai berikut:

Tanah dan bangunan di Kota Batam dengan luas 483 m² yang akan digunakan sebagai rumah negara/mess pegawai
Tanah dan bangunan di Kota Semarang dengan luas 1.790 m² yang akan digunakan untuk gedung perkantoran
Tanah dan bangunan di Kota Makassar dengan luas 150 m² yang akan digunakan untuk Rumah Solusi Ekspor
Tanah dan bangunan di Kota Samarinda dengan luas 153 m² yang akan digunakan sebagai rumah negara.
Dalam pidatonya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pentingnya pengelolaan aset, karena banyak kasus aset yang sudah diam-

bil alih namun tidak kunjung dikelola dan dimanfaatkan, kemudian kembali diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, pada hibah yang hari ini diberikan pada Pemkot Bogor, sudah baik karena memiliki rencana penggunaan yang jelas yakni akan dimanfaatkan sebagai ibukota baru. "Acara ini diselenggarakan bukan demi seremonialnya, namun sebagai bentuk akuntabilitas publik, sehingga kita harus senantiasa bertanggung jawab terhadap publik. Aset Eks BLBI harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat," ujar Menkeu.

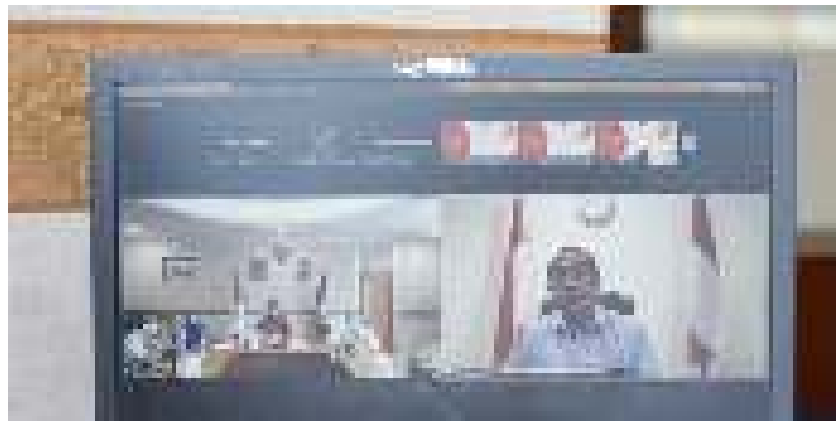
Teks: Ayu Damelia

Rekonsiliasi Indeks Pengelolaan Aset dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021

Jakarta, 24 November 2021 Biro Madan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Indeks Pengelolaan Aset dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2021. Rekonsiliasi Indeks Pengelolaan Aset dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan bagi pengelola aset dan pengadaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Manajemen BMN dan Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rekonsiliasi ini diselenggarakan pada hari Rabu, 24 November s.d Jumat, 26 November 2021. Rangkaian kegiatan pada hari pertama dibuka oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) bersama narasumber dari Direktorat Barang Milik Negara, DJKN serta pemaparan terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa bersama narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hari kedua dan ketiga akan dilakukan rapat rekonsiliasi dengan seluruh perwakilan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dilakukan secara hybrid yaitu onsite di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten dan



secara daring melalui aplikasi Zoom dengan tautan yang dibatasi. Peserta rekonsiliasi ini merupakan seluruh perwakilan Pengguna Barang Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi seluruh peserta dibagi menjadi 3 hari, dengan pembagian sebagai berikut: 1) Hari 1, Rabu 24 November 2021 untuk perwakilan dari Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 2) Hari 2, Kamis 25 November 2021 untuk perwakilan dari Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; 3) Hari 3, Jumat 26 November 2021 untuk perwakilan dari Unit Eselon I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal

Anggaran, Sekretariat Jenderal, dan Lembaga National Single Window.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Edy Gunawan menyampaikan bahwa untuk melaksanakan percepatan penyelesaian Indeks Pengelolaan Aset dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan diperlukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi para pengelola aset dan pengadaan dalam penyelesaian Indeks Pengelolaan Aset dan Pengadaan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen BMN dan Pengadaan pada umumnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga dapat tercapai pengelolaan BMN dan pengadaan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Teks: Indyashadi Satya

Ruang Kerja Bersama Satellite Office di Wilayah Kabupaten/Kota Tangerang

Rabu (13/10/2021) Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan meresmikan Satellite Office (SO) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Banten.

Satellite Office (SO) Kemenkeu merupakan kantor Kementerian Keuangan yang berlokasi diluar kantor utama unit kerja pegawai, yaitu berupa ruang kerja bersama yang dapat dipergunakan pegawai dalam melaksanakan pola kerja Flexible Working Space (FWS) serta bertujuan untuk mendekatkan tempat bekerja dengan tempat tinggal pegawai.

SO di Kanwil DJBC Banten memiliki fasilitas: Ruang Kerja dengan kapasitas 30 orang, Ruang Rapat dengan Kapasitas 10 Orang, Jaringan Internet yang memadai dan fasilitas kantor lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai.

Satellite Office (SO) Kanwil DJBC dipersiapkan sebagai bentuk sinergi penggunaan aset bersama Kementerian Keuangan dikawasan penyangga Ibu Kota/ Kota Besar agar pegawai kementerian dapat bekerja secara remote working tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor utama.



Jadi mulai sekarang, Pegawai Kementerian Keuangan yang bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan sekitarnya kini dapat menikmati fasilitas Satellite Office di Kanwil DJBC Banten sebagai bentuk adaptasi New Ways of Working (NWOW) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Yuk! kita coba bekerja dari Satellite Office Kementerian Keuangan.

Teks: Jeri Martin

Foto: Dok. Kanwil DJBC Banten

Pembangunan Hunian Bersama Pegawai Kementerian Keuangan Di Jayapura

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan kerja sama dengan Kementerian PUPR melalui program pembangunan hunian bersama berupa rumah susun negara yang diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu.

Hari ini (26/11) telah dilaksanakan Groundbreaking “Program Hunian Bersama (Rusunara)” Kementerian Keuangan melalui peletakan batu pertama yang berlokasi di Jalan Daerah Otonom, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura, Jayapura, sebagai lokasi yang pertama akan dibangun rumah susun negara.

Program ini akan berlangsung secara bertahap, di mana pada tahun 2022 akan dibangun di lokasi Jayapura dan Merauke. Kemudian dilanjut tahun 2023 pada lokasi Mimika dan Makassar. Selanjutnya, beberapa lokasi yakni Samarinda, Belawan, Pontianak, Jakarta, dan Denpasar, serta lokasi lainnya yang memenuhi kriteria akan dibangun pada tahun-tahun berikutnya.

Hunian ini akan dibangun oleh Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.



Pembangunan hunian bersama ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah optimalisasi Barang Milik Negara berupa tanah. Oleh karena itu konsep hunian rumah landed perlu diubah menjadi konsep rumah vertikal (rumah susun) menjadi sebuah solusi yang tepat dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang kita miliki.

Sri Mulyani dalam Keynote Speechnya mengatakan “penyediaan hunian bersama ini merupakan salah satu implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset bersama dalam program Kemenkeu Satu. Dengan konsep hunian bersama ini, kita hilangkan sekat-sekat egosentris antar unit, kita hentikan sikap silo-silo antar eselon 1. Kita Kementerian Keuangan, dan kita satu keluarga.”

Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas kerja sama yang telah terjalin, semoga kerja sama antara Kemenkeu dan Kementerian PUPR dalam pembangunan rumah susun negara berjalan solid dan berkelanjutan.

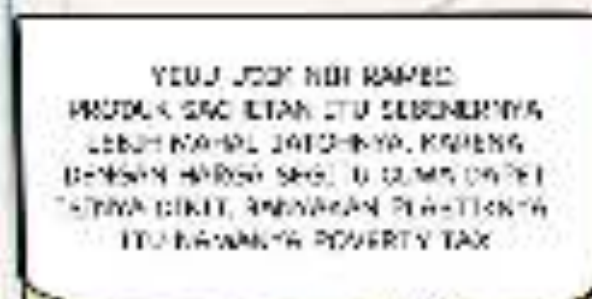
Sehingga melalui program ini pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai abdi negara.

Teks: Jeri Martin

Foto: Dok. KPP Jayapura

Komik PAST!

Plastic
Waste





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PRIME

PASTIKAN
Aset Kita

#LAYANAN TANPA BIAYA!



INDEKS KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2020

Registrasi dan Verifikasi: **4.53/5**

Helpdesk (Call Center, Email, WhatsApp): **4.73/5**

Pelatihan Aplikasi Pengadaan: **4.68/5**

Asistensi Pengadaan: **4.85/5**

SANGAT PUAS



Call Center
134



WhatsApp
0852 1740 4522



Email
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

#PastikanAsetKita #RomadanZIBKWBMM

BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN

// ZONA
INTEGRITAS
Menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

info Pasti

MEDIA INFORMASI **PENGADAAN DAN ASET TERKINI**